



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 juncto Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2002 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 15 Seri C – 1);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SUKABUMI TAHUN 2005 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

4. Perangkat

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah dibentuk dalam rumusan visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Sukabumi Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 30 Seri E-5), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJM Daerah Tahun 2008-2013.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Kota Sukabumi merupakan salah satu kota andalan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan sektor unggulan pada perikanan dan pariwisata. Selain itu Kota Sukabumi juga berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan diarahkan menjadi salah satu pusat keluar masuknya aliran orang dan barang dari dan ke daerah sekitarnya.

Kota Sukabumi di dalam sistem perkotaan Jawa Barat ditetapkan sebagai kota hirarki III A yang memiliki fungsi dan peran sebagai :

1. Pusat Produksi, Koleksi, dan Distribusi dengan skala pelayanan inter regional; dan
2. memiliki intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi.

Dengan modal dasar Sumber Daya Manusia serta keanekaragaman budaya, tujuan Kota Sukabumi terinspirasi dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*".

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, dengan demikian dokumen ini bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi Kota Sukabumi untuk melakukan pembangunan berkelanjutan di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia baik aparatur maupun masyarakat sipil sehingga Kota Sukabumi dapat sejajar dengan kota-kota penyangga Ibukota dengan daya saing yang kuat dan terpercaya di dalam pergaulan nasional maupun internasional.

Dalam

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 harus menganut paradigma perencanaan yang visioner dan hanya memuat arahan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Daerah Kota Sukabumi sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 adalah selama 20 (dua puluh) tahun yaitu sesuai dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Namun untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) Daerah Kota Sukabumi tidak dapat mengikuti periode RPJM Nasional karena Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2008, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, dan dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulan setelah terpilih Kepala Daerah harus menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pelaksanaan RPJPD Kota Sukabumi adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan dibagi ke dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam :

1. RPJMD I : Perencanaan yang dipakai adalah Rencana Strategis Kota Sukabumi Tahun 2003-2008;
2. RPJMD II : Tahun 2008-2013;
3. RPJMD III : Tahun 2013-2018;
4. RPJMD IV : Tahun 2018-2023;
5. RPJMD IV : Tahun 2023-2025.

RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan, Kepala daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada tahun 2008, 2013, 2018, dan 2023. Namun demikian, Kepala Daerah terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tujuan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah ini adalah untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya manusia secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- f. mewujudkan kehidupan seluruh warga Kota Sukabumi yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini menggunakan pendekatan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) yang menggambarkan struktur permasalahan yang dihadapi sebagai *input* dan pencapaian hasil pembangunan yang kemudian dianalisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka RPJP Daerah Kota Sukabumi yang diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan daerah mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Sukabumi serta strategi untuk mencapainya. Adapun visi Kota Sukabumi 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah "TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI SEBAGAI PUSAT PELAYANAN BERKUALITAS BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERDAGANGAN DI JAWA BARAT BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA".

Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa yang sudah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. apabila visi telah dirumuskan maka perlu dinyatakan dengan tegas dalam misi yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan Jangka Panjang lebih mengarah pada perencanaan yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan kepada partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), individu pemikir visioner, serta unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kompetensi oleh pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karena itu RPJP Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, organisasi masyarakat, dan organisasi politik.

Penyusunan RPJP Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan RPJPN Tahun 2005-2025.

Rancangan

Rancangan RPJP Daerah Kota Sukabumi ditetapkan oleh DPRD melalui Peraturan Daerah. Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 terdiri dari 5 (lima) BAB dan 8 (delapan) Pasal yang mengatur mengenai pengertian, muatan dalam RPJP Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, serta lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 yang berisikan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Sukabumi Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD Tahun 2008, Tahun 2013, Tahun 2018 dan Tahun 2023.

Ayat (2)

Kepala Daerah terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja perangkat daerah yang kemudian dihimpun dan dianalisis hasilnya oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sukabumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. PENGANTAR

Seiring dengan bergulirnya era reformasi sebagai dampak dari krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka. Gerakan reformasi berpengaruh pula pada sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik mengarah pada sistem desentralistik dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana di dalamnya mengatur urusan wajib dan urusan pilihan dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada Walikota untuk melakukan koordinasi perencanaan, pengawasan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di tingkat Kota yang berdasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana terdapat urusan wajib dan urusan pilihan sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Untuk itulah Pemerintah Kota Sukabumi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025.

Dampak reformasi tersebut berpengaruh pula pada tatanan perencanaan pembangunan sehingga pada kurun waktu 1997-2004 pemerintah belum dapat menyusun dokumen perencanaan, sebagaimana pada kurun waktu 1969-1997, dimana pemerintah dengan baik telah memiliki rencana pembangunan nasional jangka panjang secara sistematis melalui tahapan lima tahunan. Pada kurun waktu 1997-2004 tersebut pemerintah dan pemerintahan daerah baru dapat menyusun kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional/Daerah dan selanjutnya digantikan oleh Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana kerja pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam jangka menengah 5 (lima) tahun.

Berdasarkan kronologis di atas, untuk menjaga pembangunan berkelanjutan maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Diperjelas pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. Selanjutnya dalam RPJP Nasional menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berpedoman pada RPJP Nasional baik substansi maupun jangka waktunya, sehingga perencanaan pembangunan mulai dari Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota saling berkaitan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Pada akhir Tahun 2025 diharapkan dapat terwujud sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif dan berakhlak mulia. Kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain ditandai

oleh berkembangnya usaha dan investasi di Kota Sukabumi, sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada Tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka yang semakin rendah dan jumlah penduduk miskin yang makin dapat ditekan, pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan pelaksanaan manajemen pendidikan yang maju, peningkatan kualitas pendidikan secara kompetitif dan terpadu, pelayanan kesehatan yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya pelayanan kesehatan pada semua akses serta pelayanan kesehatan yang dikelola secara profesional, terpadu dan kompetitif. Mewujudkan Kota Sukabumi nyaman dan indah ditandai dengan dapat terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut Pemerintah Kota Sukabumi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 yang disusun selain mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi serta memperhatikan karakteristik dan potensi Kota Sukabumi yang diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan sebagai cerminan cita-cita bersama yang akan dicapai yaitu terciptanya masyarakat Kota Sukabumi yang terlindungi, sehat, sejahtera, cerdas dan berkeadilan. Selanjutnya RPJP Daerah Kota Sukabumi menjadi dasar bagi Walikota dan Wakil Walikota dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah selama masa jabatan 5 (Lima) Tahun.

I.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RPJP Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 - 2025 merupakan pedoman umum bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh unsur dan lapisan masyarakat di Kota Sukabumi dalam melaksanakan pembangunan Kota Sukabumi dalam kurun waktu 20 (dua puluh tahun).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat serta sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Sukabumi.

Adapun tujuannya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama adalah untuk :

1. mensinergikan perencanaan pembangunan Kota Sukabumi 20 (dua puluh) tahun kedepan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, dalam tatanan masyarakat yang mandiri, bebas, maju dan sejahtera lahir batin.

2. mendukung koordinasi dan saling melengkapi antar pelaku pembangunan Kota Sukabumi, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah dan Pusat, menjamin penggunaan sumber daya Kota Sukabumi secara efektif, efisien, berkeadilan, transparan, akuntabel, partisipatif, kedilan sosial dan berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan pembangunan di Kota Sukabumi.

I.4. LANDASAN HUKUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sukabumi disusun atas dasar :

1. Landasan Idiil Pancasila;
2. Landasan Konstitusional UUD 1945;
3. Landasan Operasional :
 - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
 - f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
 - g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;
 - q. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 / 2020 / SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

I.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJP Daerah Kota Sukabumi disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang memuat pengantar, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan
- BAB II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting pada titik awal penyusunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 dalam setiap sektor pembangunan, analisis terhadap tantangan yang akan dihadapi selama 20 tahun ke depan serta prediksi kondisi umum masing-masing sektor pembangunan 20 tahun ke depan.
- BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2005 - 2025 yang memuat visi pembangunan daerah Kota Sukabumi dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.
- BAB IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2005 - 2025 yang memuat upaya-upaya untuk mengatasi kendala dan permasalahan serta tantangan yang akan terjadi untuk pencapaian Visi dan Misi Kota Sukabumi
- BAB V : Penutup

BAB II

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM

KOTA SUKABUMI

II.1. KERANGKA PIKIR RPJPD KOTA SUKABUMI 2005 – 2025

Seiring dengan berjalannya waktu, penambahan jumlah penduduk Kota Sukabumi diprediksikan akan meningkat yang puncaknya diperkirakan akan terjadi pada Tahun 2025 yaitu sebesar 404.374 jiwa, kondisi ini harus diimbangi dengan penyediaan pangan, perumahan dan infrastruktur pendukungnya. Selain itu permasalahan yang harus dihadapi di masa yang akan datang adalah terjadinya kerusakan dan polusi lingkungan yang pada saat ini sudah mulai terjadi. Dengan bertambahnya penduduk kebutuhan pangan juga akan semakin meningkat di samping kebutuhan lain yang dipasok oleh sektor industri serta meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya alam untuk meningkatkan produksi seperti bahan bakar minyak dan sumber energi lain. Bahan bakar minyak ini digunakan selain untuk proses industrialisasi juga digunakan untuk kegiatan transportasi maupun konsumsi domestik.

Kota Sukabumi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Jawa Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menghadapi hal yang sama di masa-masa yang akan datang. Dengan melihat fakta dan kecenderungan yang ada, berbagai langkah harus ditempuh untuk tetap menjamin terlaksananya pembangunan pada masa yang akan datang. Pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki sinergi yang kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat yang pada gilirannya akan mendukung pada pencapaian Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta untuk menjamin terlaksananya pembangunan Kota Sukabumi yang berkelanjutan.

II.2. KONDISI PADA SAAT INI

Secara historis Kota Sukabumi dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai *Burgerlijk Bestuur* (1914) dengan status *Gemeenteraad Van Sukabumi* yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang Belanda dan Eropa sebagai pengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Lebak. Dalam konteks perekonomian regional kala itu Kota Sukabumi sudah dilengkapi dengan fasilitas pergudangan, fasilitas perbengkelan, dan jaringan transportasi seperti kereta api dan jalan raya yang berakses langsung ke pelabuhan samudera di Jakarta sehingga terjadi kegiatan ekspor impor. Namun demikian dalam perjalanan sejarah kejayaan itu menyurut dikarenakan kesinambungan pengelolaan dan pemeliharaan asset-asset yang berbasis perkebunan tidak lagi menguntungkan akibat semakin ketatnya persaingan dengan negara-negara produsen sejenis.

Memasuki era kemerdekaan dengan dibentuknya sistem pemerintahan daerah, Kota Sukabumi termasuk ke dalam kategori kota kecil yang disebut sebagai Kotapraja yang memiliki areal seluas 1.215 Ha dan terdiri dari 2 (dua) kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 daerah Kota Sukabumi mengalami perluasan menjadi 4.800,23 Ha dengan 5 (lima) Kecamatan. Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 dimekarkan menjadi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Cikole, Cibeureum, Citamiang, Lembursitu, Warudoyong, Baros dan Gunung Puyuh yang terdiri dari 33 kelurahan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Sukabumi (Kabupaten Sukabumi)
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Nyalindung (Kabupaten Sukabumi)
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Cisaat (Kabupaten Sukabumi)
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukaraja (Kabupaten Sukabumi)

Batas wilayah administrasi dan posisi Kota Sukabumi dalam Konstelasi Regional Jawa Barat berada pada posisi strategis karena berada di antara pusat pertumbuhan mega urban JABOTABEKB dan BANDUNG RAYA yang merupakan salah satu kawasan andalan dari 8 kawasan andalan di Jawa Barat (RTRW Jawa Barat) yang berpotensi selain memacu perkembangan wilayahnya juga mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah disekitarnya (*hinterland*).

Pembangunan Kota Sukabumi pada hakekatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Sukabumi berupaya untuk selalu mengadakan perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan ke arah pembangunan kota yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang lebih potensial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global.

Arah pembangunan Kota Sukabumi sangat berkaitan erat dengan pembangunan manusia yang sejahtera sebagai subjek maupun objek pembangunan. Kemajuan pembangunan manusia secara makro di Kota Sukabumi dapat dilihat dari perkembangan salah satu indikator makro yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini didasarkan pada aspek Pendidikan (*Education*), aspek Kesehatan (*Health*) dan aspek Daya Beli (*Purchasing Power*) serta tidak terlepas pula dari pengembangan aspek lainnya seperti modal sosial, modal fisik dan modal alamiah yang keseluruhannya merupakan salah satu faktor kritis bagi ketangguhan jangka panjang perekonomian kota. Perkembangan Indikator Makro selama kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 merupakan cermin kinerja pembangunan Kota Sukabumi, di samping itu indikator makro pembangunan Kota Sukabumi juga mengindikasikan sejauh mana dampak dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Sukabumi.

Pencapaian IPM Kota Sukabumi dari Tahun 2000 sampai Tahun 2006 menunjukkan hasil di atas rata-rata daerah di Provinsi Jawa Barat, demikian juga untuk indikator makro lainnya yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Untuk IPM Kota Sukabumi pada Tahun 2000 mencapai 66,77 dan Tahun 2006 mencapai 75,09. Namun demikian peningkatan ini belum sesuai dengan target IPM yang telah ditetapkan dalam Renstra Kota Sukabumi Tahun 2003-2008 yaitu pada Tahun 2006 IPM Kota Sukabumi ditetapkan sebesar 78,37. Hal ini menunjukkan adanya *gap* antara target dan realisasi sebesar 3.28 point.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi pasca krisis ekonomi menunjukkan indikasi membaik dan stabil. Tahun 2000 LPE Kota Sukabumi mencapai 4,82% sampai dengan Tahun 2006 LPE Kota Sukabumi dengan nilai sementara meningkat sampai dengan 6,23%. Pertumbuhan ini didukung oleh sektor-sektor yang ada, berdasarkan data dari BPS Kota Sukabumi sektor-sektor yang mengalami laju pertumbuhan yang cukup signifikan diantaranya adalah Sektor Bangunan dari -1.37% pada Tahun 2004 menjadi 6,16% pada Tahun 2006, Sektor Jasa-jasa dari 2,88% pada Tahun 2004 menjadi 6,17 pada Tahun 2006, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dari 6,76% pada Tahun 2004 menjadi 8,45% pada Tahun 2006. Namun demikian ada beberapa sektor yang mengalami penurunan di antaranya Sektor Pertanian dari 8,74% pada tahun 2004 menjadi -0,76% pada Tahun 2006 dan Sektor Keuangan, Jasa Perusahaan dan Persewaan dari 11,30% pada Tahun 2004 menjadi 2,01% pada Tahun 2006.

Meskipun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi cenderung positif namun belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan inflasinya. Walaupun relatif kurang signifikan, secara umum dapat diamati bahwa kecenderungan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung akan diikuti pula oleh inflasi yang tinggi. Inflasi Kota Sukabumi pada Tahun 2000 adalah 6,34%

dan cenderung mengalami fluktuasi dengan rata-rata laju pertumbuhan inflasi 10,36%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Sukabumi, LPE Kota Sukabumi cenderung mengalami pertumbuhan rata-rata 5,39% per tahun. Namun pada Tahun 2005 inflasi meningkat sangat tinggi yaitu mencapai 19,71% yang dipicu oleh regulasi kenaikan Bahan Bakar Minyak yang mencapai 132% dan pada Tahun 2006 kembali turun menjadi 12,22%.

Perkembangan perekonomian Kota Sukabumi dapat pula dilihat dari investasi yang ditanamkan baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Investasi pemerintah dapat dilihat langsung dari jumlah pengeluaran pembangunan/belanja publik, sedangkan investasi swasta dan masyarakat dapat dilihat dari posisi kredit yang dikeluarkan oleh perbankan yang ada di Kota Sukabumi. Iklim yang kondusif untuk investasi di Jawa Barat berdampak pada iklim investasi di Kota Sukabumi, hal ini terlihat dengan bertambahnya jumlah investasi yang pada Tahun 2002 akumulasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) non pemerintah sebesar Rp 67,163 Milyar dan investasi swasta Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 2,2 Milyar, dalam perkembangannya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) non pemerintah bertambah menjadi Rp. 293,527 milyar dan investasi swasta PMA menjadi sebesar Rp 2,7 Milyar pada Tahun 2006.

Namun demikian dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan selama periode Tahun 2001 - 2006. Gambaran kemiskinan di Kota Sukabumi secara umum mengalami penurunan pada Tahun 2001 berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana tercatat penduduk miskin Kota Sukabumi berjumlah 9.386 KK atau berjumlah 37.544 Jiwa, sedangkan pada Tahun 2006 jumlah penduduk miskin berjumlah 12.346 KK atau sebanyak 49.384 jiwa. Apabila melihat target yang diharapkan dalam Renstra Kota Sukabumi Tahun 2003-2008 ternyata jumlah penduduk miskin belum tertangani dengan optimal sesuai dengan target yang diharapkan dengan tingkat capaian baru mencapai 69,89%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya yang telah dilakukan melalui pengguliran program-program penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota Sukabumi belum memberikan hasil yang optimal.

Selain itu masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari para pemangku kepentingan pembangunan. Masalah dasar yang terjadi selama ini terutama pada masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), sempitnya lapangan kerja, produktivitas rendah dan masalah pengangguran. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2000 sebesar 13,33%, tahun 2001 sebesar 14,51%, tahun 2002 sebesar 23,12% dan Tahun 2006 sebesar 11,56%. Apabila melihat persentase pengangguran di atas terlihat bahwa data pengangguran berfluktuasi ini menunjukkan bahwa walaupun memiliki Laju Pertumbuhan Ekonomi yang terus meningkat namun kondisi tersebut belum mempunyai dampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan kondisi diatas, pembangunan daerah dipengaruhi oleh berbagai aspek antara lain :

A. SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Kependudukan

Jumlah Penduduk Kota Sukabumi pada akhir Tahun 2007 tercatat sebanyak 280.143 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Sukabumi selama periode Tahun 2004-2006 yang mengalami peningkatan pada Tahun 2004 mencapai 3,72% dan Tahun 2006 sebesar 2,44%. Peningkatan LPP Kota Sukabumi masih dalam taraf wajar dan dapat dikatakan masih dalam batas pertumbuhan yang rasional. Apabila dilihat dari Laju Pertumbuhan Penduduk alami pada tahun 2004 adalah sebesar 2,19% dan tahun 2006 mencapai 1,84%. Namun demikian yang tidak kalah pentingnya adalah adanya arus migrasi masuk ke Kota Sukabumi dimana laju pertumbuhannya pada tahun 2004 mencapai 1,53%

dan pada tahun 2006 mencapai 0,60%. Kondisi ini mengandung konsekuensi penyediaan infrastruktur dan kebutuhan lainnya.

2. Agama

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pembangunan bidang keagamaan pada dasarnya adalah merupakan Urusan Pemerintah Pusat. Pembangunan bidang keagamaan di Kota Sukabumi pada dasarnya adalah memfasilitasi peningkatan kualitas kerukunan sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kehidupan beragama dan aktifitas keagamaan diantaranya berupa penyelenggaraan MTQ dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota dan keikutsertaan dalam MTQ Tingkat Provinsi, selain itu untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Sukabumi dilaksanakan melalui himbauan untuk sholat subuh berjama'ah antara warga masyarakat dan aparatur di lingkungan Kota Sukabumi, komunikasi antar sesama alim ulama, tokoh agama dan pemerintah.

3. Pendidikan

Pembangunan aspek pendidikan di Kota Sukabumi dititikberatkan pada peningkatan mutu, perluasan kesempatan belajar terutama pada jenjang pendidikan dasar. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya tenaga pendidik yang profesional, berkualitas dan kompeten dalam bidang yang diajarkannya dan kurang terwujudnya pemerataan pendidikan di segenap lapisan masyarakat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada terwujudnya pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berdaya saing serta berakhlak mulia.

Hasil evaluasi terhadap pembangunan pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk Kota Sukabumi selama periode Tahun 2000-2006 mengalami peningkatan yang cukup baik, pada Tahun 2000 menunjukkan angka 98,04% dan Tahun 2006 sebesar 99,08%. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sukabumi selama periode Tahun 2000-2006 mengalami peningkatan secara signifikan sesuai dengan target yang diharapkan dalam Renstra Kota Sukabumi Tahun 2003-2008. Pada Tahun 2000 menunjukkan RLS sebesar 8,20, Tahun 2005 sebesar 9,15, dan Tahun 2006 mencapai 9.30. Jika dikaitkan dengan Target pendidikan pada Tahun 2005 Kota Sukabumi telah mencapai wajar dikdas 9 tahun dan mulai Tahun 2006 Kota Sukabumi mencanangkan rintisan pendidikan wajib belajar 12 Tahun.

Berhasilnya pencapaian Variabel RLS tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan atau Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan komponen yang dijadikan indikator makro Kota Sukabumi dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Data pencapaian APM pada Tahun 2006 dapat digambarkan sebagai berikut : pencapaian APM tingkat SD/ sederajat sebesar 97.05%. APM tingkat SMP/ sederajat sebesar 82.92%, dan APM tingkat SMU/ sederajat adalah sebesar 58.46%. Sedangkan untuk Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan penduduk seluruh umur yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu terhadap kelompok umur tertentu pada tingkat pendidikan tertentu. Data indikator pencapaian APK diseluruh jenjang sekolah yang ada di Kota Sukabumi pada Tahun 2006, yaitu : pencapaian APK tingkat SD/ sederajat pada Tahun 2006 sebesar 105.85%. APK tingkat SMP/ sederajat pada Tahun 2006 sebesar 100.90 %. APK tingkat SMU/ sederajat pada Tahun 2006 sebesar 98.51 %.

4. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Kota Sukabumi pada Tahun 2005 meliputi Pengembangan upaya kesehatan yang dilakukan dengan pendekatan: pemerataan fasilitas kesehatan (*equity*), peningkatan mutu pelayanan kesehatan (*equality*), dan kesinambungan pelayanan (*sustainability*).

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Sukabumi mengalami peningkatan setiap Tahunnya, terlihat dari data Tahun 2000 telah mencapai 66.90 Tahun dan pada Tahun 2006 mencapai 71,80 Tahun. Selain AHH, gambaran tingkat kesehatan masyarakat juga ditunjang oleh besarnya Angka kematian Bayi (AKB), yang menggambarkan jumlah Bayi yang lahir hidup per 1.000 kelahiran Bayi. AKB merupakan ciri dalam menghasilkan tingkat keturunan yang berkualitas, memiliki harapan dengan penurunan jumlah bayi yang mati diharapkan akan meningkatkan ketersediaan SDM yang dapat berkiprah dan mendukung pembangunan. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Sukabumi selama periode Tahun 2000-2006 mengalami penurunan, pada Tahun 2000 mencapai 41.00 orang/1000 kelahiran hidup dan Tahun 2006 sebesar 32,27 orang/1000.

Selain itu Angka Kematian Ibu (AKI) perkembangannya memperlihatkan kecenderungan yang berfluktuatif dimana pada tahun 2000 AKI mencapai 5 orang, pada tahun 2002 mengalami peningkatan menjadi 11 orang dan pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 4 orang.

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Sukabumi telah menunjukkan perubahan yang signifikan hal ini tercermin dari peningkatan hidup kualitas perempuan. Salah satu indikator keberhasilan di atas Pemerintah Kota Sukabumi mengambil beberapa kebijakan terhadap peningkatan peran kaum perempuan dan anak seperti yang diamanatkan dalam *MDGs (Millennium Development Goals)* yang secara kualitatif dan kuantitatif di seluruh sektor dan aspek pembangunan memperlihatkan bahwa kiprah perempuan dalam bidang politik semakin meningkat. Salah satu tujuan pencapaian *Millennium Development Goal (MDG)* adalah kesetaraan Gender yang intinya ingin menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mulai dimasukkan pada Indeks Pembangunan Manusia versi *Human Development Report (HDR)* I pada tahun 1995. HDR yang diluncurkan hampir bersamaan waktunya dengan Konferensi Dunia IV mengenai perempuan di Beijing dengan mengulas secara khusus "kesenjangan Gender Global" dan memunculkan ukuran-ukuran baru tentang kesetaraan Gender dalam pembangunan manusia. Ukuran pertama adalah Indeks Pembangunan yang berkaitan dengan Gender (*GDI/Gender-related Development Index*) yang mencerminkan ketimpangan gender di bidang kesehatan dasar, pendidikan dan pendapatan. Khusus dalam kaitannya dengan perempuan, ukuran kuantitatif dapat digunakan IPJ (Indeks Pembangunan Gender). IPJ menunjukkan seberapa jauh kebutuhan paling mendasar telah dipenuhi yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan dan penghasilan dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin.

Human Development Report (HDR) 2003 secara eksplisit menyatakan kalau tidak ada kemajuan dalam kesetaraan gender, maka *Millennium Development Goal (MDG)* tidak akan bisa dicapai. Hal ini menggambarkan bahwa kesetaraan gender dalam bidang pembangunan akan membantu perempuan mengamankan pekerjaan di luar rumah dan mendapatkan kekuasaan politik, memberikan sumbangan kepada kelembagaan publik.

Indeks Pembangunan Gender Kota Sukabumi pada tahun 2006 baru mencapai 60,36 sedangkan angka IPM Kota Sukabumi tahun 2006 sebesar 75,09. Jika dilihat

antara angka IPM dengan angka IPG Kota Sukabumi di tahun 2006 ini, ternyata angka IPG masih lebih rendah dibanding angka IPM. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Sukabumi masih terdapat ketimpangan gender dalam pembangunan manusia yang dicapai oleh laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender harus dilakukan upaya peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, termasuk dalam perencanaan dan pengawasan, penguatan peran masyarakat dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan dan lembaga-lembaga yang mempunyai misi pemberdayaan perempuan agar semakin mantap dan mandiri dalam pengausutmaan gender ke dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan.

6. Pemuda dan Olahraga

Pemuda merupakan salah satu sumber daya yang harus dikembangkan dan diberdayakan karena ditangan merekalah pembangunan Kota Sukabumi akan berlanjut dan pemuda merupakan salah satu tulang punggung keberhasilan pembangunan Kota yang akan datang, disamping itu pemuda sebagai salah satu cita-cita penerus bangsa harus disiapkan dan dikembangkan pula beberapa aspek penunjang seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan hidup, kesehatan dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari BPS Kota Sukabumi hasil Registrasi Penduduk akhir Tahun 2006 yang tercatat dalam buku Kota Sukabumi Dalam Angka 2006 bahwa jumlah penduduk usia 15 – 34 tahun di Kota Sukabumi mencapai 90.860 Jiwa atau 32% dari total penduduk Kota Sukabumi. Dengan potensi tersebut Kota Sukabumi harus dapat memberdayakannya menjadi generasi yang siap dan maju untuk membangun Kota Sukabumi sebagai kota terpadu dan pusat perdagangan, kesehatan dan pendidikan.

7. Seni dan Budaya

Pembangunan di bidang seni dan budaya sudah mengalami kemajuan yakni ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, pentingnya toleransi dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa adanya kekerasan serta mulai berkembangnya interaksi antar budaya. Pentingnya pembangunan kebudayaan di Kota Sukabumi ditujukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan kaidah kebudayaan daerah itu sendiri dan yang lebih penting adalah melestarikan jati diri dan nilai budaya di tengah semakin derasnya informasi dan pengaruh negatif budaya asing yang sudah masuk ke Indonesia.

8. Kesejahteraan Sosial

Berbagai program kesejahteraan sosial dilaksanakan di Kota Sukabumi dengan tujuan untuk menjamin standar hidup dan fungsi yang memadai bagi semua anggota masyarakat, salah satu contoh adalah Penyandang Masalah Sosial. Jumlah penyandang masalah sosial di Kota Sukabumi merupakan salah satu indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Penyandang masalah sosial Tahun 2003 sebanyak 13.843 orang dan Tahun 2006 sebanyak 14.008 orang atau terjadi peningkatan sebesar 1,17%. Hal ini menunjukkan belum berhasilnya program-program yang berkaitan dengan penanganan masalah sosial. Dilihat dari jenis penyandang masalah sosial yang ada, angka yang paling dominan adalah penyandang masalah sosial fakir miskin, disusul oleh keluarga dengan perumahan yang tidak layak huni, wanita rawan ekonomi, anak terlantar dan lanjut usia terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penyandang sosial sangat berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan. Program terobosan untuk mengatasi kemiskinan telah dilaksanakan di Kota Sukabumi melalui program DAKABALAREA, Program Pendanaan Kompetisi IPM (PPK-IPM) yang bertujuan untuk mengakselerasi aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek daya beli, Program Kota Sukabumi yang

berupa Komite Penanggulangan Kemiskinan, dan program tersebut akan terus digalakan dengan memperhatikan karakter dan kondisi yang terjadi dimasa mendatang.

B. EKONOMI

1. Kondisi perekonomian Kota Sukabumi yang ditandai dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara umum cenderung membaik, pada tahun 2000 mencapai 4.82% sampai dengan Tahun 2006 LPE Kota Sukabumi mencapai 6.23%. Pertumbuhan ini didukung oleh sektor-sektor yang ada, berdasarkan data dari BPS Kota Sukabumi sektor-sektor yang mengalami laju pertumbuhan yang cukup signifikan di antaranya adalah Sektor Bangunan dari -1.37% pada tahun 2004 menjadi 6.16% pada Tahun 2006, Sektor Jasa-jasa dari 2.88% pada Tahun 2004 menjadi 6.17 pada Tahun 2006, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dari 6.76% pada Tahun 2004 menjadi 8.45% pada Tahun 2006. Namun demikian ada beberapa sektor yang mengalami penurunan diantaranya Sektor Pertanian dari 8.74% pada Tahun 2004 menjadi -0.42% pada Tahun 2006 dan Sektor Keuangan, Jasa Perusahaan dan Persewaan dari 11.30% pada Tahun 2004 menjadi 2.01% pada Tahun 2006.
2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung akan diikuti pula oleh inflasi yang tinggi, Laju Inflasi Kota Sukabumi pada Tahun 2000 adalah 6,34% dan cenderung mengalami fluktuasi dengan rata-rata Laju Inflasi 10,36%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Sukabumi, LPE Kota Sukabumi cenderung mengalami pertumbuhan rata-rata 5,39% per tahun. Pada Tahun 2002 laju inflasi mencapai 7.50 % per tahun, pada Tahun 2003 laju inflasi mencapai 9.51% per tahun, akibat kebijakan penyesuaian harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administred prices*), pada Tahun 2004 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 7.27%. Akibat kebijakan pemerintah pusat terutama kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga mencapai ± 132 % menyebabkan inflasi pada Tahun 2005 kembali meningkat hingga mencapai angka 19.71% dan pada Tahun 2006 kembali turun menjadi 12.22%. Kondisi ini semakin memperlemah daya beli masyarakat terutama lapisan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
3. Masih rendahnya rasio kemandirian daerah Kota Sukabumi yang baru mencapai 11.73, memperlihatkan bahwa kemampuan anggaran daerah Kota Sukabumi masih banyak tergantung pada pusat, untuk itu diperlukan peningkatan sumber dana yang dapat dilakukan dengan optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan aset daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi yang ada dengan tidak membebani masyarakat.
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau persentase jumlah angkatan kerja yang bekerja dan mencari kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja yang ada di Kota Sukabumi masih relatif rendah. Pada tahun 2000 persentasenya tercatat sebanyak 44.64%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja kembali mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, tercatat pada Tahun 2003 mencapai 44,85% dari angkatan kerja. Sampai pada Tahun 2006 masih relatif rendah yaitu mencapai angka 45,30% dari angkatan kerja.
5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat Kota Sukabumi. Tahun 2006 tercatat ada 1.667 Industri yang berskala Kecil dan 22 Industri yang berskala Menengah dengan daya serap tenaga kerja di sektor ini relatif besar yaitu sebanyak 10.079 orang dan merupakan basis penghasilan utama dari sebagian masyarakat kota. UMKM juga menyerap tenaga kerja perempuan yang relatif besar terutama yang bergerak di sektor-sektor usaha jasa perdagangan, kerajinan, dan jasa boga. Meski demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, di antaranya adalah rendahnya akses permodalan, kesinambungan pasokan bahan baku, lemahnya posisi tawar sehingga menekan harga jual, kualitas produk rendah, rendahnya akses informasi pasar, dan rendahnya daya saing.

6. Kegiatan perekonomian di Kota Sukabumi juga didukung dengan adanya berbagai jenis koperasi. Menurut jenisnya koperasi dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu koperasi menurut lembaga dinas, koperasi menurut usaha komoditi dominan dan koperasi lainnya. Banyaknya koperasi aktif di Kota Sukabumi sampai dengan Tahun 2006 mencapai 323 buah dengan jumlah anggota mencapai 27.359 orang dari 323 koperasi 139 diantaranya dalam kondisi sehat dan jumlah modal sendiri sebesar Rp 17.682.102.000, modal luar sebesar Rp 20.923.931.000, dan aset sebesar Rp 38.973.117.000,-
7. Industri jasa perbankan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana memegang peran sentral dalam suatu perekonomian. Terganggunya proses penghimpunan dan penyaluran dana tersebut akan sangat berpengaruh terhadap aktifitas perekonomian, oleh karena itu peranan perbankan sangat diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian di Kota Sukabumi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia Bandung, di Kota Sukabumi tercatat sebanyak 27 Bank yang terdiri dari Bank Pemerintah sebanyak 9 buah, Bank Swasta Nasional sebanyak 15 buah, dan Bank Pembangunan Daerah sebanyak 1 buah. Besarnya simpanan dana pihak ketiga mengalami peningkatan 2,62% dari Rp 1.396.959 juta pada Tahun 2004 menjadi Rp 1.433.556 juta pada Tahun 2005. Demikian pula kredit yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar 62,77% dari Rp. 464.756 juta pada Tahun 2004 menjadi Rp. 756.495 juta pada Tahun 2005. Namun demikian jenis penggunaan kredit tersebut masih didominasi untuk Konsumsi yaitu sebesar Rp. 448.496 juta, untuk Modal Kerja sebesar Rp. 266.090 juta dan untuk Investasi sebesar Rp. 41.909 juta.
8. Fasilitas perdagangan, dalam hal ini pasar tradisional, sebagian besar masih belum memenuhi kualitas dan kuantitas yang diharapkan. Di Kota Sukabumi masih mengandalkan Pasar Pelita dan sekitarnya sebagai pusat perdagangan dan bisnis. Pemerintah Kota Sukabumi sudah mencari jalan keluar yaitu melalui pembentukan pasar di Kecamatan, tetapi minat pembeli di pasar kecamatan masih kurang sehingga Pasar Pelita masih menjadi salah satu andalan dalam perdagangan di Kota Sukabumi. Tahun 2006, Pasar Pelita yang menempati lahan seluas $\pm 14.616 \text{ m}^2$ dengan 128 Ruko (108 diantaranya dalam keadaan aktif), 1.478 Kios (560 diantaranya dalam keadaan aktif) dan 628 Los (101 diantaranya dalam keadaan aktif). Untuk sarana dan prasarana Pasar Pelita perlu adanya revitalisasi kembali karena pasar tersebut dipandang sudah tidak layak untuk dikembangkan, hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya pedagang hingga memenuhi badan jalan dan sampai ke trotoar. Adapun jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kota Sukabumi sampai dengan Tahun 2006 tercatat sejumlah ± 2.012 pedagang kaki lima. Pasar modern yang terdiri dari swalayan ada 5 unit dan minimarket 11 unit. Pasar modern ini mampu menyerap 745 orang tenaga kerja.
9. Perkembangan pendapatan daerah Kota Sukabumi mengalami peningkatan yang signifikan. Jika ditinjau dari target PAD dalam Renstra, maka realisasi PAD Tahun 2002 - 2006 (sekitar 11% hingga 13 %) tidak mencapai target PAD sesuai dengan Renstra, dimana di dalam Renstra ditargetkan sebesar 25% hingga 28 % dari APBD. Dari data yang telah ada perkembangan APBD Kota Sukabumi mulai 2002 – 2006 mengalami peningkatan, terlihat dari rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 11,16%. Namun jika melihat kontribusi rata-rata dari PAD setiap tahunnya terhadap APBD Kota Sukabumi baru menyumbangkan sebesar 11,73% pertahun hal ini berarti bahwa kemampuan fiskalnya dikategorikan belum mampu karena penerimaan kemampuan keuangan APBD Kota Sukabumi sisanya sebesar 98,17% berasal dari sumber lainnya yaitu berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Tantangan untuk meningkatkan PAD diantaranya dari aspek kewenangan, potensi jenis pungutan, regulasi, efisiensi dalam administrasi, kelengkapan sarana dan prasarana, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Beberapa aspek tersebut akan diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pendapatan.

C. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM PELAYANAN PUBLIK

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dirasakan melalui pemanfaatan hasil pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan publik. Pemanfaatan iptek yang telah berjalan di Kota Sukabumi di antaranya di bidang persampahan melalui konsep Industri Daur Ulang Sampah (INDUS), di bidang prasarana transportasi berupa penggunaan *downcounter* pada *traffic light*, di bidang Teknologi Informasi melalui konsep *Cyber City* yang selama ini dikelola oleh Kantor Infokom, PDE dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, dan penggunaan berbagai macam Sistem Informasi yang berbasis teknologi informasi yang dijalankan oleh beberapa SKPD.
2. Penguasaan dan pemanfaatan iptek dinilai masih belum optimal. Hal ini dikarenakan mekanisme intermediasi yang menjadi jembatan antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan penggunaan belum efektif, belum adanya sinergitas kebijakan yang mengakibatkan iptek belum dapat memberikan hasil yang signifikan, belum berkembangnya budaya ilmu pengetahuan dan teknologi serta belum terkaitnya hasil kajian dengan kehidupan yang nyata.
3. Di kalangan aparatur pemerintah pemanfaatan iptek belum dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan karena terbatasnya kualitas SDM untuk menyerap iptek, sarana dan prasarana teknologi yang terbatas terutama teknologi informasi yang penggunaannya belum maksimal diakses oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

D. SARANA DAN PRASARANA

1. Kondisi sarana dan prasarana di Kota Sukabumi saat ini masih belum optimal kualitas ataupun cakupan pelayanannya, sehingga belum memadai dalam menopang pembangunan sektor riil di Kota Sukabumi termasuk untuk mendorong sektor produksi serta pengembangan wilayah. Kondisi sarana dan prasarana wilayah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek transportasi, sumber daya air, telekomunikasi, listrik, dan energi. Sampai akhir Tahun 2005 kondisi aspek transportasi dapat dilihat dari :
 - Kinerja jalan pada ruas-ruas tertentu;
 - Terbatasnya aksesibilitas;
 - Daya dukung jalan yang rendah;
 - Jaringan rel kereta api yang tidak berfungsi;
 - Pemanfaatan Terminal;
 - Pemanfaatan Sub terminal.
2. Perkembangan Kota Sukabumi yang ditandai dengan meningkatnya beban dan volume lalu lintas berdampak juga pada tingkat kerusakan jalan dan jembatan. Struktur jalan di Kota Sukabumi sebagian besar konstruksinya sudah merupakan jalan aspal. Kondisi jalan di wilayah Kota Sukabumi sebagian besar dapat dikatakan dalam kondisi baik, pemeliharaan rutin maupun berkala yang dilakukan memberikan kontribusi cukup besar terhadap kondisi jalan. Keberhasilan Kota Sukabumi dalam pemenuhan fasilitas jalan yang layak ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah ruas jalan sehingga kondisinya menjadi lebih baik. Berdasarkan data pembangunan fasilitas jalan di Kota Sukabumi menurut Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi (BPS) tercatat bahwa Panjang jalan negara di Kota Sukabumi pada Tahun 2006 mencapai 8,5 km dalam kondisi baik, jalan provinsi mencapai 15,09 km dalam kondisi baik, sedangkan panjang jalan kota mencapai 142,532 km dengan rincian 43,118 km dalam kondisi baik, 45,567 km dalam kondisi sedang, dan sepanjang 53,847 km dalam kondisi rusak. Sampai sekarang, upaya pemenuhan kondisi jalan yang baik masih terus terus diupayakan dan ditingkatkan.

3. Pelayanan transportasi umum masyarakat Kota Sukabumi dilaksanakan melalui perusahaan angkutan dalam kota dan luar kota. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Sukabumi tercatat 1.531 jumlah armada angkutan dalam kota, sedangkan angkutan antar kota dilayani oleh 16 perusahaan bus dengan jumlah armada sebanyak 154 bus dan angkutan barang dilayani oleh 589 perusahaan dengan jumlah armada 637 buah truk. Untuk angkutan kereta api yang merupakan sarana transportasi murah bagi masyarakat namun semenjak ditutupnya lalu lintas kereta api jalur Sukabumi-Cianjur-Bandung mulai tanggal 9 Februari 2001, dan jalur Sukabumi-Bogor ditutup tanggal 10 Maret 2006 menyebabkan tidak tersedianya pelayanan angkutan kereta api di Kota Sukabumi.
4. Kebutuhan akan listrik terus bertambah terutama di wilayah perkotaan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan daya terpasang pada produksi listrik yang terjual serta jumlah pelanggan listrik yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada Tahun 2005, daya terpasang mencapai 84.895.215 VA, produksi listrik yang terjual 130.654.263 kwh dengan jumlah pelanggan mencapai 79.959 yang terdiri dari 73.188 pelanggan rumah tangga, 4.177 pelanggan usaha, 2.436 pelanggan publik dan 158 pelanggan industri. Seiring dengan kenaikan jumlah pelanggan dan daya yang terjual, pendapatan PT. PLN APJ Sukabumi pada Tahun 2005 juga mengalami kenaikan sebesar 16.84% dari Rp. 68,3 milyar pada Tahun 2004 menjadi Rp. 79.8 milyar pada Tahun 2005.
5. Prasarana Air Minum merupakan prasarana yang tidak kalah pentingnya, sejalan dengan perkembangan penduduk, maka kebutuhan akan air bersih pun menjadi semakin penting dan pada akhirnya berdampak pada meningkatnya permintaan akan air bersih. Volume air minum yang disalurkan pada Tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 8,45% yaitu dari 4.288.285 m³ pada Tahun 2004 menjadi 4.650.912 m³. Sementara itu dari 22.345 pelanggan PDAM Kota Sukabumi, pelanggan terbanyak adalah dari kategori pelanggan non niaga sebanyak 20.837 pelanggan (93,25%), sedangkan jumlah pelanggan terkecil adalah kategori pelanggan industri, yaitu hanya sebanyak 18 pelanggan.

E. POLITIK

1. Perkembangan proses demokratisasi ditandai dengan beberapa perubahan yang terjadi selama kurun waktu 1998 – 2002 dan dalam masa transisi tersebut Pemerintah Republik Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan dasar konsesus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara baik untuk kelembagaan negara maupun untuk masyarakat sipil, proses perubahan politik berlangsung sedemikian cepat kearah kebebasan dan dampak positif adalah mendorong paradigma penyelenggaraan pembangunan yang partisipatoris sesuai dengan prinsip *clean government and good governance*.
2. Berkaitan dengan kemajuan demokratisasi dapat terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran hak masyarakat dalam kehidupan politik yang dalam jangka panjang mampu dan mempunyai inisiatif bagi pengelolaan urusan publik. Peran tersebut tidak terlepas pula dalam peran partai politik, organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil lainnya.
3. Perkembangan demokratisasi juga ditandai dengan adanya perubahan hubungan antara pusat dengan daerah dan perbedaan posisi antara legislatif dan eksekutif hal ini sebagai akibat yang ditimbulkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mendorong daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri dan mengatur hubungan kewenangan antar tingkat pemerintahan. Sampai saat ini pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah belum menunjukkan hasil yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan belum adanya regulasi mengenai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah secara komprehensif

F. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum ditentukan oleh perkembangan kriminalitas dan berkurangnya kecenderungan konflik sosial. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan faktor utama untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan peranan yang sangat mendukung dalam ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya. Upaya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum adalah dengan dibangunnya paradigma yang kokoh yaitu peranan masyarakat, Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan untuk menciptakan suasana tenteram, tertib, dan nyaman sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kota Sukabumi. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Polisi Pamong Praja dan Kesatuan Bangsa. Akan tetapi di Kota Sukabumi yang menjadi kendala sampai saat ini adalah mulai berkurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung keamanan dan ketertiban umum. Hal ini dapat dibuktikan dengan berkurangnya masyarakat untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya.

G. PEMERINTAHAN

1. Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kota Sukabumi masih perlu ditingkatkan. Beberapa kekurangan yang masih menghambat kinerja dan efisiensi kerja aparat adalah terkait dengan beberapa faktor, antara lain belum optimalnya koordinasi inter dan antar instansi sehingga masih dijumpai duplikasi dan hambatan dalam implementasi kebijakan dan juga belum optimalnya perubahan pola pikir dan kultur birokrasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik.
2. Pelayanan umum kepada masyarakat di semua fungsi pemerintahan belum didukung oleh jumlah personil yang cukup, dengan kualifikasi pendidikan yang relatif memadai. Pada sisi lain, kompetensi tinggi dituntut dalam rangka menyikapi perkembangan pembangunan yang pesat dalam 20 tahun mendatang perlu diantisipasi sejak sekarang. Standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang memuaskan, kompetensi tinggi dan profesionalisme aparatur pemerintah menjadi salah satu faktor penting pembangunan kota di masa mendatang menuju terwujudnya *good governance* dan *clean government*.
3. Pelayanan umum saat ini masih belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta struktur kelembagaan yang belum efektif dalam menjalankan pelayanan umum dan pelaksanaan pemerintahan di Kota Sukabumi.
4. Respon Pemerintah Kota dalam mengapresiasi perkembangan kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sebagai langkah awal yang baik harus sudah dikembangkan kebijakan pelayanan umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pelayanan umum dengan konsep *community charter based* tampaknya ke depan akan menjadi sebuah keharusan karena masyarakat madani dengan tingkat perkembangan kemajuan yang sudah sangat tinggi di semua aspek kehidupannya akan menuntut aplikasi demokrasi partisipatif yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari.
5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi pada Tahun 2005 tercatat sebanyak 4.337 orang, yang melayani 259.268 orang penduduk, sehingga rasio perbandingan antara PNS terhadap masyarakat adalah rata-rata 1 : 60 orang. Perbandingan tersebut mengakibatkan beban pegawai cukup besar. Menurut tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil lulusan S3/S2 sebanyak 116 orang, lulusan S1 sebanyak 1.171 orang, D3/Akademi sebanyak 1.331 orang, SMA/SMK sebesar 1.377 orang, lulusan SLTP sebanyak 163 orang dan SD sebanyak 169 orang. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian adalah PNS (guru) yang perlu diantisipasi terutama guru inpres pertama diprediksikan akan terjadi

pensiun massal.

6. Kesiapan aparatur dalam mengantisipasi demokratisasi perlu ditingkatkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang *easier, cheap, dan faster*. Sumber daya aparatur perlu disiapkan secara matang dan *Qualified* untuk menghadapi tantangan demokratis dan globalisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi antara lain *e-Government, e-Procurement, e-Budgetting, e-Controlling, e-Business dan Cyber law*.

H. TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan beberapa kawasan andalan dan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat salah satu diantaranya adalah kawasan andalan Sukabumi dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan perkebunan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Kota Sukabumi ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), selain itu Kota Sukabumi juga diarahkan menjadi salah satu pusat keluar masuknya aliran orang dan barang dari dan ke daerah sekitarnya;
2. Dalam Sistem perkotaan Jawa Barat, Kota Sukabumi ditetapkan sebagai kota hierarki III A yang memiliki fungsi dan peran sebagai pusat produksi, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan inter regional dan juga sebagai kota yang memiliki intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi;
3. Dominasi pemanfaatan ruang kota mencakup hasil pembangunan yang saat ini memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang didukung oleh sistem jaringan prasarana dan sarana lingkungan, sebagai salah satu modal dasar utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkesinambungan. Kondisi eksisting perkembangan Kota Sukabumi ditandai dengan masih terpusatnya kegiatan perekonomian, kesehatan, pendidikan tingkat lanjutan dan perkantoran di pusat kota (CBD) yang bertumpu pada wilayah Kecamatan Cikole, Citamiang, Gunung Puyuh, dan Warudoyong sehingga pengembangan daerah perluasan yang mencakup wilayah Kecamatan Baros, Cibeureum, dan Lembursitu masih relatif lambat;
4. Pola tata ruang Kota Sukabumi dalam RTRW sampai dengan 2011 yang mengamanatkan proporsi kawasan budidaya sebesar 92,52 % atau sekitar 4.441.231 Ha sedangkan untuk kawasan lindung sebesar 7,48 % atau sekitar 359.000 Ha. Kawasan lindung ini menghadapi kendala dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

I. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Keterlibatan seluruh potensi masyarakat untuk melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan budaya ramah lingkungan, sadar lingkungan, selaras dengan pengembangan militasi untuk terus ditumbuhkembangkan.
2. Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan fungsi kelestarian lingkungan. Secara umum kualitas udara di Kota Sukabumi hasil pengukuran *Mobile Monitoring Station* belum melebihi baku mutu udara ambien. Tetapi berdasarkan hasil pemantauan, dapat dilihat bahwa untuk parameter PM10 dan CO terdapat kecenderungan naik pada waktu yang sama setiap harinya. Hal tersebut terjadi akibat aktivitas transportasi yang tinggi/padat yaitu pada pagi dan sore hari.
3. Pengolahan air limbah domestik di Kota Sukabumi masih sangat rendah. Pengolahan air limbah domestik pada umumnya dilakukan secara individual pada masing-masing rumah tangga (*on-site sanitation*). Air limbah dari sarana tersebut, baik yang diolah secara teknis atau pun tidak diolah sama sekali umumnya dialirkan ke saluran terbuka atau langsung ke sungai. Air limbah domestik (berasal dari pemukiman) terutama terdiri atas tinja, air kemih, dan buangan air limbah

lainnya (kamar mandi, dan cucian). Dari hasil pengujian kualitas air sungai pada 25 titik, terdapat kandungan coli tinja sebesar 6.000, 80.000, 120.000, > 120.000, dan > 240.000 MPN/100. (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, untuk sungai kelas III maksimal 2.000 MPN/100). Pencemaran ke badan air tidak hanya disebabkan oleh air limbah domestik, tetapi air limbah usaha dan/atau kegiatan juga turut andil dalam pencemaran ke badan air.

4. Volume sampah di Kota Sukabumi pada Tahun 2006 adalah \pm 670,48 m³/hari, sedangkan volume sampah yang terangkut baru mencapai 80 % (536,38 m³/ hari). Daerah pelayanan belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Sukabumi. Kecilnya jangkauan pelayanan persampahan di Kota Sukabumi dikarenakan sumber daya dan prasarana yang masih kurang. Masyarakat yang tidak terlayani sistem, mengelola sampahnya dengan cara membakar atau menimbun di halaman. Tetapi sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai halaman yang cukup, membuang sampah ke tempat-tempat terbuka dan sungai.
5. Lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) yang digunakan saat ini di Kota Sukabumi terletak di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu. TPA Cikundul memiliki luas 5,1 Ha. Metoda yang diterapkan di TPA Cikundul adalah *controlled landfill* tetapi belum optimal. Eksistensi TPA Cikundul pada gilirannya menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah. Tanpa adanya TPA, sampah yang terakumulasi akan menimbulkan masalah. Pada gilirannya, Pemerintah Kota Sukabumi seyogyanya menempatkan pengelolaan sampah dalam tingkat prioritas yang paling tinggi, dan Dinas Kebersihan menempatkan pengelolaan TPA sebagai prioritas utama. Pengelolaan sampah di TPA adalah pekerjaan yang terus berkembang secara kontinyu, seperti pengupasan tanah, pengurugan, penutupan, dan lain-lain yang membutuhkan pengelolaan yang serius dan memuaskan setiap hari, bukan hanya persoalan membuang sampah.
6. Sampai Tahun 2006, Kota Sukabumi belum memiliki Hutan Kota.

II.3. TANTANGAN

A. SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Kependudukan

Dalam 20 tahun mendatang Kota Sukabumi diprediksikan akan mengalami tekanan jumlah penduduk yang besar, jumlah penduduk di Kota Sukabumi pada Tahun 2007 sebesar 280.143 jiwa dan diperkirakan akan mengalami peningkatan yang diprediksikan berjumlah 404.374 jiwa pada Tahun 2025, dan laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2025 sebesar 1,82%. Komposisi penduduk menurut kelompok umur sampai dengan tahun 2025 diperkirakan akan terjadi pergeseran menjadi bertambahnya komposisi struktur umur produktif. Tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah menciptakan penduduk yang seimbang dalam rangka menciptakan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah usia non produktif, serta upaya menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk untuk terwujudnya penduduk yang tumbuh dengan seimbang guna peningkatan kualitas, daya saing, dan kesejahteraannya. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perubahan pola persebaran penduduk diperluas ke wilayah Baros, Cibeureum dan Lembursitu serta di wilayah-wilayah Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kota Sukabumi.

2. Agama

Pembangunan di sektor agama didorong untuk menciptakan kondisi terbaik dalam pengamalan nilai-nilai agama di lingkungan komunitas terkecil yaitu keluarga.

Bersamaan dengan itu keluarga merupakan awal dari pendidikan agama hal ini dibuktikan dengan semakin banyak arus informasi dan budaya asing yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. Disamping itu tantangan dalam pembangunan jangka panjang Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 yaitu pembangunan sarana dan prasarana keagamaan. Pengkajian dan aplikasi ajaran agama, mewujudkan kerukunan intern antar umat beragama secara fungsional dan proporsional, pengelolaan sumber dana keumatan perlu dikelola berdasarkan ajaran agama sesuai dengan tata kelola yang baik, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.

3. Pendidikan

Pembangunan pendidikan perlu ditingkatkan agar mencapai dimensi kualitatif sumber daya manusia yang memiliki keterampilan berdasarkan proses akademisnya, penguasaan iptek serta moralitas, kondisi tersebut merupakan pondasi yang harus dibangun sebelumnya. Sementara itu tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan pendidikan adalah bagaimana menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi setara Wajib Dikdas 15 tahun serta menjadikan bidang pendidikan menjadi salah satu daya tarik kota, menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antar penduduk kaya dan miskin, antar penduduk perkotaan dan pedesaan, antar penduduk di wilayah maju dan tertinggal, serta antar laki-laki dan perempuan. Pada tingkat pendidikan dasar dan terutama tingkat menengah kualitas lulusan harus menjadi perhatian utama karena semakin tinggi persaingan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

Dengan berkembangnya teknologi informasi perlu dilakukan antisipasi sejak dini yaitu dengan mengembangkan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi guru dengan meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan sarana dan prasarana yang lebih mengarah pada teknologi, serta pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dilandasi oleh nilai akhlak, kecerdasan dan kearifan budaya lokal serta dengan memperbanyak sekolah kejuruan. Di samping itu juga harus dikembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa untuk anak didik sehingga dapat dicapai lulusan yang berbudi pekerti luhur yang mempunyai wawasan ilmu pengetahuan. Hal ini berarti kompetensi pendidik harus menggunakan standar nasional karena pendidik mempunyai tanggung jawab yang penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Kesehatan

Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi antara lain, mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan, mengendalikan penanganan akibat penyakit menular (HIV-AIDS, Tb Paru, DBD), meningkatnya penyakit degeneratif dan penyalagunaan NAPZA serta teknologi di bidang kesehatan. Memperhatikan kondisi tersebut selama kurun waktu 20 tahun pembangunan di bidang kesehatan harus didorong pada tercapainya kondisi yang memungkinkan terciptanya perilaku sehat dan di lingkungan sehat baik fisik maupun sosial. Tantangan yang lain di bidang kesehatan adalah menjadikan pelayanan bidang kesehatan ini menjadi salah satu daya tarik kota. Untuk mendukung tercapainya kondisi tersebut maka para pemangku kepentingan pembangunan harus meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan, pembiayaan kesehatan yang terjangkau terutama bagi masyarakat miskin, meningkatkan pembiayaan kesehatan baik melalui anggaran pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat dan swasta, peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan meningkatkan

kualitas sarana dan prasarana kesehatan antara lain pengembangan rumah sakit rujukan di wilayah Baros, Cibeureum dan Lembursitu atau peningkatan puskesmas menjadi tempat rawat inap, kemandirian masyarakat dan penggunaan teknologi kesehatan.

5. Pemberdayaan Perempuan dan Anak-Anak

Tantangan di bidang pembangunan perempuan adalah meningkatkan kualitas gender di berbagai bidang sebagaimana yang tercantum dalam *Millennium Development Goals (MDGs) 2015*, peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, penurunan tindak kekerasan, penurunan eksploitasi, penurunan *trafficking*, serta penurunan tindak diskriminasi perempuan dalam dunia usaha dan politik melalui penguatan kelembagaan, kelompok masyarakat khusus perempuan, dan jaringan kemitraan pengarusutamaan gender.

6. Pemuda dan Olahraga

Tantangan pembangunan di bidang kepemudaan adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, menstabilkan kondisi perkembangan psikologis pemuda, dan melemahnya sandaran nilai dan norma, banyaknya kompetisi yang diakibatkan karena arus globalisasi, serta pelestarian karakter, idealisme dan budaya bangsa. Tantangan pembangunan di bidang olahraga adalah belum bisa dirasakannya pembinaan keolahragaan yang komprehensif dan berkesinambungan agar seluruh potensi olahraga dapat dikembangkan secara baik, penguatan peran dan tanggung jawab masyarakat beserta pemangku pembangunan untuk mengembangkan sarana dan prasarana keolahragaan misalnya melalui pembangunan Gelanggang Olahraga yang terpadu dengan standar internasional, di samping itu harus ditumbuhkembangkan manajemen peningkatan kualitas atlet secara profesional, terpadu, dan berstandar internasional.

7. Seni dan Budaya

Kondisi pembangunan selama beberapa tahun terakhir mengalami berbagai perubahan hal ini merupakan pengaruh global dunia yang sekaligus menjadi tantangan bagi terwujudnya pembangunan seni budaya pada Tahun 2025. Tantangan pembangunan seni dan budaya selama 20 tahun ke depan adalah harus adanya upaya kongkrit yang berkesinambungan dalam pelestarian nilai-nilai tradisional, peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman. Pada masa yang akan datang perkembangan ke 4 (empat) aspek tersebut semakin bertentangan dengan arus perkembangan teknologi informasi dan era komputerisasi. Tantangan tersebut harus dilaksanakan dengan upaya yang kongkrit dan berkesinambungan terhadap pelestarian dan pengembangan bahasa dan budaya daerah di antaranya melalui pendidikan dengan menyusun, mengembangkan dan menerapkan kurikulum yang menunjang pelestarian seni dan budaya. Selain itu diperlukan upaya revitalisasi terhadap lembaga/organisasi kesenian yang didukung sepenuhnya oleh seluruh pemangku pembangunan yang terdiri dari Pemerintah selaku fasilitator, pelaku/pengusaha industri pariwisata dan masyarakat sendiri, juga upaya pelestarian cagar budaya dan pembuatan pasar wisata serta revitalisasi kawasan Cikundul.

8. Kesejahteraan Sosial

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, karang taruna dan panti rehabilitasi sosial dengan manajemen pengelolaan yang lebih komprehensif dan profesional. Tantangan 20 tahun ke depan mengenai masalah

kesejahteraan sosial adalah masalah krisis sosial seperti mengikisnya nilai budaya dan agama, meningkatnya akses dan gejala sosial akibat dampak dari kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan keadaan di atas maka dalam 20 tahun ke depan diharapkan kesejahteraan sosial lebih mengarah kepada upaya pemberdayaan, pelayanan, pencegahan, rehabilitasi, pengembangan dan perlindungan sosial serta pembangunan panti rehabilitasi orang jompo.

B. EKONOMI

1. Tantangan pembangunan ekonomi di Kota Sukabumi pada 20 tahun ke depan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas, sekaligus mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kota Sukabumi pada Tahun 2025 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6% sampai dengan 7% per tahun. Struktur perekonomian di Kota Sukabumi akan didominasi oleh sektor perdagangan, jasa-jasa, hotel dan restoran, serta pengangkutan. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dan perdagangan bebas (AFTA) yang terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi penentu bagi kelanjutan pembangunan ekonomi. Keadaan tersebut mendorong para pemangku pembangunan di Kota Sukabumi untuk menguatkan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah yang nantinya akan menjadi penggerak roda pertumbuhan perekonomian yang didukung ekonomi berbasis penelitian dan teknologi, perkembangan pusat induk agribisnis, dan kawasan perdagangan yang terpadu.
2. Dalam 20 tahun ke depan pengembangan perekonomian dititikberatkan pada peningkatan investasi dalam upaya mendukung perekonomian Kota Sukabumi, untuk sekarang ini permasalahan investasi masih terbentur pada kurang lengkapnya infrastruktur (misalnya belum tuntasnya pembangunan jalan lingkar Kota Sukabumi) dan proses perizinan. Upaya promosi investasi perlu ditingkatkan untuk menarik investasi baru di Kota Sukabumi baik melalui media promosi yang inovatif serta penggunaan teknologi informasi yang memiliki jaringan yang sangat luas.
3. Untuk tantangan bidang pariwisata dalam 20 tahun mendatang adalah bagaimana mengembangkan pariwisata di Kota Sukabumi didasarkan pada optimalisasi potensi internal yang ada. Hal ini dikarenakan Kota Sukabumi tidak memiliki obyek wisata yang memadai sehingga pengembangan pariwisata dilakukan dengan melalui pendirian pasar seni, wisata religius atau kunjungan ke pondok pesantren serta pengembangan dan revitalisasi kawasan pariwisata yang telah ada misalnya pemandian air panas Cikundul. Di samping itu posisi geografis Kota Sukabumi yang diapit oleh 2 sungai, dapat dimanfaatkan untuk pariwisata air dan pendirian taman air, serta memfasilitasi pembentukan kawasan hiburan di Kota Sukabumi sehingga dapat menarik wisatawan. Diharapkan pula peningkatan wisatawan harus diiringi oleh penataan produk dan daya tarik wisata dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata. Adapun pengembangan produk dan daya tarik akan difokuskan pada pengembangan akar dan alam budaya Jawa Barat sehingga dapat mencerminkan jati diri masyarakat Kota Sukabumi. Sedangkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lebih dititikberatkan pada pengetahuan, pemahaman dan kesadaran seluruh pengelolaan daya tarik wisata dan fasilitas penunjang wisata misalnya pembuatan kawasan wisata kuliner kota Sukabumi.
4. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam penanggulangan jangka panjang sehingga pada 20 tahun mendatang jumlah penduduk miskin di Kota Sukabumi terus berkurang dan secara bertahap dapat terpenuhi hak dasar rakyat miskin. Pada saat ini masalah kemiskinan sangat

berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, kebutuhan akan pangan, sandang, rumah, kesehatan, dan pendidikan merupakan tantangan ke depan yang harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

5. Tantangan untuk ketenagakerjaan pada 20 tahun mendatang adalah meningkatnya jumlah angkatan kerja yang merupakan kelompok usia produktif sehingga perlu disikapi dengan berbagai upaya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar, menyediakan lulusan sekolah kejuruan berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan produktifitas dan *skill* tenaga kerja, mengurangi permasalahan perburuhan dalam rangka mengendalikan jumlah pengangguran yang diprediksi semakin besar di masa mendatang.

C. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Dalam rangka peningkatan kemampuan iptek pada 20 tahun mendatang tantangan yang harus dihadapi dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas serta sinergi yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat, sarana prasarana dan pembiayaannya, pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat, peningkatan komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengatasi degradasi fungsi lingkungan, antisipasi dan meminimalisir dampak akibat bencana alam dalam kerangka menghadapi perkembangan global menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu pembangunan iptek dalam 20 tahun mendatang harus didasari oleh nilai-nilai luhur yaitu akuntabilitas, inovatif dan visioner.

D. SARANA DAN PRASARANA

1. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Sukabumi pada Tahun 2025, mengandung konsekuensi harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman, dan infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
2. Tantangan yang akan dihadapi dalam sektor transportasi mendatang adalah :
 - Menuntaskan pembangunan jalan lingkar Kota Sukabumi guna mengeliminir penurunan kinerja jalan di dalam kota;
 - Melakukan peningkatan jalan akses baik dari aspek kualitas maupun kuantitas terutama pada kawasan-kawasan pengembangan yang didukung oleh manajemen dan rekayasa lalu lintas yang efektif, efisien dan aman;
 - Dengan adanya jalan tol yang menghubungkan Ciawi-Sukabumi-Padalarang sehingga jarak dari Jakarta ke Sukabumi hanya memakan waktu \pm 2 Jam, begitu juga dengan jarak antara Bandung ke Sukabumi hanya memakan waktu \pm 1 Jam, harus ditangkap sebagai salah satu peluang bagi pengembangan ruang Kota Sukabumi yang berdampak pada upaya pertumbuhan ekonomi kota;
 - Masih kurangnya kualitas maupun kuantitas prasarana lalu lintas seperti, marka, rambu dan APILL;
 - Meningkatkan kinerja ruas-ruas jalan dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada penyediaan ruas-ruas jalan beserta fasilitas pendukungnya yang humanistik;

- Perlunya pengembangan SAUM (Sarana Angkutan Umum Masal) melalui program penggantian angkot pada jalur-jalur utama dengan pelayanan bis dan pengalihan rute lintasan angkutan kota pada jalur-jalur lokal dan jalur yang belum terlayani oleh angkutan umum. Sehingga pengembangan sarana angkutan umum harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien;
 - Penertiban kendaraan tidak bermotor (*Un-Motorized*) dan angkutan ilegal (*ojek*) dan penyediaan jalur khusus untuk kendaraan tidak bermotor khususnya pada jalur-jalur padat;
 - Perlunya pengaktifan kembali jalur rel kereta api yang menghubungkan antara Bandung–Cianjur–Sukabumi–Bogor dan Jakarta dan tidak menutup kemungkinan pengaktifan jalur kereta api panjang misalnya Sukabumi – Surabaya.
3. Tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya air yang digunakan oleh beberapa sektor adalah meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampungan air yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh orang banyak selain itu pembangunan sarana prasarana infrastruktur pengembangan air baku yang sekaligus sebagai pengendali banjir seperti waduk, situ, memasyarakatkan gerakan hemat air, pengelolaan jaringan irigasi dengan mengutamakan peran masyarakat petani dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi. Selain itu melihat kondisi sumber air baku yang masih terdapat di luar wilayah Kota Sukabumi, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan air baku untuk kepentingan masyarakat.
 4. Untuk tantangan 20 tahun ke depan adalah bagaimana Pemerintah Kota Sukabumi menangani sampah dengan cara mengembangkan teknologi persampahan, di samping itu TPA Cikundul hanya dapat menampung sampah di Kota ini sampai dengan 2013 jadi apabila sampai dengan tahun tersebut tantangan ini belum terselesaikan maka Pemerintah Kota Sukabumi akan dihadapkan kepada permasalahan yang sangat rumit, jadi solusi untuk permasalahan tersebut adalah disamping mempergunakan teknologi untuk mengelola sampah perlu juga adanya perluasan atau relokasi kembali terhadap TPA yang ada di Cikundul.

E. POLITIK

1. Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang terutama dalam pembangunan politik adalah diperlukannya proses komunikasi massa, komunikasi sosial dan komunikasi politik yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan harmonis. Dalam rangka menjaga momentum demokrasi tersebut tantangan yang akan dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan secara berkesinambungan dan sejajar sehingga sehingga sasaran demokrasi dapat tercapai.
2. Selama kurun waktu 2005–2025 *civil society* memerlukan penyelenggaraan proses komunikasi massa, komunikasi sosial, dan komunikasi politik yang berorientasi pada penyelenggaraan demokratisasi yang harmonis. Pembangunan bidang komunikasi dan informasi tidak dapat terlepas dari kualitas pengembangan kualitas pemahaman terhadap fungsi kelembagaan dan media informasi. Hal ini ditandai dengan kebebasan pers dan media yang sudah berkembang pesat antara lain adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun pada kenyataannya kalangan pers belum dapat mengatasi dampak dari kebebasan tersebut antara lain masih berpihak pada kepentingan industri dari pada kepentingan publik yang luas.

3. Melihat tantangan ke depan dan semakin berkembangnya globalisasi maka Pemerintah Kota Sukabumi memerlukan pemimpin daerah yang mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintah, memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual untuk menggerakkan manajemen pemerintahan yang baik, inovatif bebas kolusi, korupsi, nepotisme serta konsekuen terhadap perencanaan yang telah menjadi produk warga Kota Sukabumi.

F. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Masalah gangguan keamanan dan ketertiban umum masih berlangsung dengan banyaknya tindak kriminalitas. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pengangguran karena belum seimbangnya antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Tantangan selama 20 tahun ke depan adalah bagaimana mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang belum seimbang dan merata.

G. PEMERINTAHAN

1. Tantangan kedepan selama 20 tahun adalah bagaimana menata sistem hukum/ peraturan di daerah yang maksimal sehingga dapat mewujudkan sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.
2. Di samping itu tantangan terbesar lainnya adalah masih adanya disharmonisasi antar tingkat pemerintah berkaitan dengan pengelolaan kewenangan daerah, penyelenggaraan birokrasi yang efektif dan efisien belum terimplementasi dengan baik. Selama ini birokrasi belum mengalami perubahan yang signifikan dan apabila sampai 20 tahun ke depan belum ada perubahan, permasalahan akan menjadi semakin kompleks yaitu dengan adanya desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Dengan adanya desentralisasi maka setiap daerah dituntut dapat menggali potensi yang ada di wilayahnya untuk menarik investasi.
3. Proses demokratisasi yang selama ini sudah dilaksanakan membuat rakyat semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di samping pengawasan terhadap birokrasi. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik.
4. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi Teknologi Informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business*, *e-controlling*, *e-budgetting*, dan *cyber law* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah juga diharapkan akan meningkatkan prinsip tata pemerintahan yang baik.
5. Peningkatan sumber daya aparatur merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi 20 tahun mendatang hal ini disebabkan karena tantangan yang semakin berat dan kompleks sehingga dituntut kemampuan aparatur yang dapat mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan secara akademis, persuasif dengan tanpa meninggalkan aspek-aspek *good governance* dan *clean government*. Di samping itu peningkatan kesejahteraan yaitu pemberian stimulan kepada aparatur pemerintah yang menurut profesi, dan prestasi harus lebih ditingkatkan.
6. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi, kebutuhan lahan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan perkantoran sampai Tahun 2011 adalah

94,00 Ha atau 1,96 % dan kebutuhan lahan tersebut mengarah kepada pembangunan kota baru yaitu di Kawasan Baros, Cibeureum dan Lembursitu (BACILE). Lahan seluas ini diperuntukkan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta yang diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan berkembangnya kota di masa yang akan datang.

H. TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengaruh tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan di masa mendatang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis pada ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperuntukkan bagi :

- a. arahan lokasi kegiatan;
 - b. batasan kemampuan lahan termasuk di dalamnya daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam;
 - c. efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan;
2. Tantangan tata ruang dan pengembangan wilayah dalam 20 tahun ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja Rencana Bagian Wilayah Kota (BWK) untuk memacu perkembangan kota dan meningkatkan pelayanan sosial ekonomi terhadap masyarakat, mengatasi berbagai persoalan ruang dan pemerataan pembangunan.
 3. Pemerataan pemanfaatan ruang antara wilayah Kota Sukabumi bagian utara/kota lama dan selatan/kota baru, serta wilayah-wilayah Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kota Sukabumi yang kemungkinan akan masuk ke dalam wilayah Kota Sukabumi.

I. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan keterbatasan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup yang dimiliki Kota Sukabumi serta melihat kondisi yang ada sekarang ini, tantangan untuk 20 tahun ke depan adalah mengoptimalkan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup, sehingga tercapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup serta tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

II.4. MODAL DASAR

Modal dasar Pembangunan adalah merupakan salah satu kekuatan dan peluang baik yang efektif maupun yang potensial yang dimiliki dan didayagunakan sebagai salah satu dasar pembangunan daerah antara lain :

1. Posisi geografis Kota Sukabumi yang berada pada posisi strategis karena berada di antara pusat pertumbuhan mega urban JABOTABEK dan BANDUNG RAYA ini, merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan salah satu kawasan andalan dari 8 kawasan andalan di Jawa Barat (RTRW Jawa Barat) yang berpotensi selain memacu perkembangan wilayahnya juga mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah di sekitarnya (*hinterland*).

2. Wilayah Kota Sukabumi merupakan pengembangan salah satu kawasan perdagangan, pendidikan dan kesehatan, di samping itu letak Kota Sukabumi sangat strategis ± 120 Km dari ibukota negara sehingga dimungkinkan perkembangan Kota Sukabumi dalam 20 tahun mendatang dapat menjadi salah satu alternatif tempat tinggal, tujuan wisata, dan pengembangan bisnis.
3. Dengan karakteristik geografis dan kewilayahan yang dimiliki Kota Sukabumi dimana sebagian wilayahnya masih bersifat pedesaan dengan sektor pertanian yang masih dominan, pengembangan kekayaan alam terutama pertanian harus memberdayakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada sehingga pendayagunaan teknologi pertanian harus dilakukan dengan tanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.
4. Karena Kota Sukabumi tidak memiliki sumber daya alam, maka sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah. Sumber daya manusia baik aparatur, organisasi profesi, maupun akademisi mempunyai peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung terciptanya pembangunan daerah.
5. Perkembangan politik yang telah melalui tahap reformasi dan akan melalui tahap demokrasi yaitu melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pada Tahun 2008 akan memberikan perubahan yang mendasar bagi tercapainya proses demokratisasi bidang politik serta desentralisasi bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

BAB III

VISI TAHUN 2005 – 2025 DAN MISI KOTA SUKABUMI

III.1. VISI PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya perubahan ke arah yang lebih baik bagi suatu bangsa. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh merupakan tahapan dalam kerangka pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Kota Sukabumi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki visi yang selaras dengan visi pembangunan nasional 2005 – 2025 yaitu *"Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur* serta harus selaras pula dengan visi Provinsi Jawa Barat yaitu *"Dengan Iman dan Takwa, Jawa Barat Sebagai Provinsi Termaju Di Indonesia"*, sebagai bentuk harapan kondisi yang diinginkan terwujud pada akhir tahun 2025.

Berdasarkan kondisi keunggulan dan kelemahan Kota Sukabumi pada saat ini, tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki yaitu sumber daya manusia, reformasi politik, sumber daya alam, sumber daya sosial, ekonomi serta budaya, maka Kota Sukabumi menetapkan visi pembangunan Tahun 2005 – 2025 sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI SEBAGAI PUSAT PELAYANAN BERKUALITAS BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERDAGANGAN DI JAWA BARAT BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA "

Visi tersebut mengandung konsekuensi bahwa Kota Sukabumi harus dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang diindikasikan dengan tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Visi tersebut mengandung makna dan tujuan bahwa Kota Sukabumi sangat memandangi bahwa kapasitas dan kapabilitas *civil society* serta birokrat dalam memenuhi tantangan lokal, nasional dan internasional akan menentukan peningkatan investasi di segala bidang, selain itu Kota Sukabumi juga memandangi kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penentu daya saing suatu daerah. Selain penduduk, lembaga pendidikan dan pelayanan kesehatan serta balai latihan yang dimiliki baik yang berskala lokal maupun regional merupakan potensi bagi perkembangan regional melalui upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kota Sukabumi.

Tujuan pembangunan daerah Kota Sukabumi adalah mewujudkan manusia yang sejahtera, sehat, cerdas, disiplin, kreatif, produktif, inovatif, dan berakhlak mulia serta bertanggung jawab bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, dan adil. Seluruh proses penyelenggaraan pembangunan jangka panjang Kota Sukabumi terkonsentrasi pada upaya sistematis untuk menumbuhkembangkan partisipasi sosial masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan paradigma pembangunan yang berpihak kepada pencapaian lingkungan masyarakat yang bermartabat (*social dignity*) yang menyelaraskan nilai keunggulan iptek dan pemanfaatannya, keterampilan yang profesional dan kecerdasan pikir, kematangan sikap dan ketepatan tindakan berdasarkan kepribadian dan kearifan budaya lokal dan agama.

Kota Sukabumi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam konstelasi penataan ruang Jawa Barat memberikan peluang dan sekaligus tantangan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan yang dimiliki baik aspek pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun perdagangan untuk wilayah di sekitarnya sehingga akan meningkatkan daya tarik dan daya saing kota yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian kota yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat Kota Sukabumi yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera sebagai wujud dari amanat Undang-Undang

Dasar 1945 dan tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals*) dapat tercapai.

Pelayanan pendidikan yang berkualitas adalah pembangunan pendidikan melalui pemantapan dan peningkatan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan baik manajemen maupun kurikulum pendidikannya. Selain sebagai fungsi sosial dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Sukabumi juga harus menjadi salah satu daya tarik kota dalam kerangka membangun keunggulan kompetitif kota terhadap wilayah lain di Jawa Barat yang juga bermuara pada peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan mendirikan perguruan tinggi negeri di samping memberikan pembinaan dan dukungan terhadap perguruan tinggi swasta yang telah ada, sehingga secara sinergis dapat tumbuh dan berkembang bersama.

Aspek Pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masa 20 tahun yang akan datang, sebagai salah satu wilayah utama pengembangan perilaku hidup dan paradigma sehat, di Jawa Barat diselenggarakan pembangunan kesehatan berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu pelaksanaan *rightsizing* untuk mewujudkan *universal health insurance coverage* harus dioptimalkan. Dalam upaya pencapaian visi kota pelayanan kesehatan seperti halnya rumah sakit dan Puskesmas selain untuk melayani masyarakat sebagai fungsi sosial diarahkan juga untuk menjadi salah satu daya tarik kota, sehingga keunggulan kompetitif kota semakin meningkat dan secara bertahap mengarah pada pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Di samping itu dengan adanya beberapa lembaga pendidikan di bidang kesehatan merupakan modal utama untuk mendidik dan mengembangkan potensi sumber daya manusia bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi.

Pembangunan pusat pelayanan perdagangan berkualitas untuk 20 tahun ke depan ditekankan pada prinsip pertumbuhan yang tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), tingginya produktivitas masyarakat Kota Sukabumi, tingginya nilai investasi dalam pembangunan daerah baik investasi yang berasal dari dalam negeri, investasi asing maupun investasi masyarakat serta terkendalinya laju inflasi dan laju pertumbuhan penduduk. Pembangunan perekonomian juga bersinergi dengan pembangunan aspek pendidikan dan pembangunan aspek kesehatan yang dari keduanya diharapkan terjadi efek berantai (*multiplier effect*) serta dari sektor-sektor lainnya yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dan kota secara keseluruhan. Kondisi ini tentunya harus diwujudkan melalui pelaksanaan misi-misi kota yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan dukungan seluruh komponen masyarakat Kota Sukabumi, dimana misi tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi kota yang telah ditetapkan.

Keberhasilan tujuan pembangunan jangka panjang sangat ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada di daerahnya melalui pengembangan yang diarahkan pada perdagangan, pendidikan, kesehatan dan pengembangan sektor lainnya. Beberapa syarat yang dibutuhkan untuk pencapaian visi Kota Sukabumi di antaranya adalah : (1) kehidupan sosial budaya yang didasarkan pada keimanan dan ketakwaan; (2) *good governance* dan *clean government*; (3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta (4) optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya pembangunan.

III.2. MISI PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Sukabumi tersebut, terdapat 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan dalam membangun Kota Sukabumi pada periode 2005 -2025 yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya.

Dalam upaya mewujudkan visi Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan diperlukan optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Sukabumi sehingga dapat menumbuhkan keunggulan kompetitif kota, sumber daya yang dimiliki Kota Sukabumi adalah sumber daya manusia. Pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia dimaksimalkan melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan mampu berdaya saing dalam hal penguasaan dan pemanfaatan penerapan menuju inovasi iptek secara berkelanjutan dengan keterampilan, kreativitas, inovatif, inventif, dan bertanggung jawab untuk 20 tahun ke depan, serta memberikan kesempatan kepada penyandang cacat untuk dapat meningkatkan sumber daya dan kapasitas dirinya.

2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas.

Adalah melalui pemenuhan kebutuhan suprastruktur dan infrastruktur pendidikan dengan meningkatkan manajemen pendidikan, mutu tenaga pendidik, sarana dan prasarana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;

3. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas.

Adalah terealisasi mutu SDM yang produktif, siap berkompetitif secara dinamis melalui peningkatan manajemen kesehatan, pengembangan informasi kesehatan dan pembiayaan kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat dimaksimalkan. Di samping itu pemerintah juga perlu mengeluarkan regulasi dalam bidang manajemen kesehatan, pelayanan kesehatan, pelibatan pihak swasta dan masyarakat dalam mencapai *universal health insurance coverage*. Pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan basis peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta optimalisasi pelaksanaan reformasi kelembagaan/pengelolaan fasilitas kesehatan dengan SDM yang produktif mempunyai nilai tambah kompetitif dan daya saing tinggi menjadi kelembagaan entitas mandiri.

4. Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Lapangan Usaha Lainnya Yang Berdaya Saing Tinggi

Adalah melalui pengembangan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa yang mampu menumbuhkan kekuatan ekonomi rakyat dari berbagai sektor lapangan usaha, khususnya membangun kemitraan bersama usaha kecil, menengah, dan besar serta perekonomian rakyat yang kuat, dengan ditunjang oleh regulasi yang kondusif.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dan Amanah.

Adalah dengan lebih memantapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*), membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, kemitraan yang serasi dan harmonis antara eksekutif dan legislatif, penciptaan stabilitas politik dan penegakan hukum yang konsisten di semua bidang, menciptakan sistem pelayanan yang efisien, efektif dan terpadu sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang diharapkan, terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kerjasama antar daerah dalam kerangka saling mengisi dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Mewujudkan Kota Sukabumi Yang Nyaman dan Indah

Adalah melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi. Hal ini untuk menjaga fungsi daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan masa kini dan masa depan serta penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan memenuhi kaidah-kaidah estetika kota, sehingga dapat mewujudkan kota yang didasarkan pada aspek peningkatan kualitas kehidupan yang memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan bagi masyarakat Kota Sukabumi.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 -2025

Tujuan pembangunan daerah Kota Sukabumi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, sejahtera, disiplin, kreatif, produktif, inovatif, dan berakhlak mulia yang bertanggung jawab bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, dan adil. Upaya mewujudkan visi Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perdagangan Di Jawa Barat Berlandaskan Iman Dan Takwa selama 20 tahun mendatang pada hakekatnya adalah dilakukan melalui pelaksanaan misi pembangunan yaitu melalui tahapan pembangunan jangka menengah dalam upaya menuju masyarakat Kota Sukabumi yang adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai salah satu ukuran tercapainya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan jasa berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan pada Tahun 2025, dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan urusan yang dimiliki oleh Kota Sukabumi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi dipedomani untuk diselaraskan dengan kebijakan dan arah pembangunan Kota Sukabumi. Adapun ukuran capaian misi Kota Sukabumi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertakwa dan Berbudaya

Ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan disertai oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dilandasi oleh keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual serta berdaya saing tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat Kota Sukabumi;
2. Adanya peningkatan peran serta dan diterapkannya nilai-nilai keagamaan di masyarakat serta adanya kerukunan hidup inter dan antar umat beragama,
3. Menguatnya peran serta masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat penyandang cacat dalam pembangunan serta meningkatnya perlindungan dan pelayanan pada masyarakat lanjut usia sehingga semakin membaiknya kualitas hidup dan pelayanan sosial dasar; dan/atau
4. Meningkatnya kualitas dan kesesuaian tenaga kerja dengan pasar kerja melalui perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dengan prioritas pada pencapaian keseimbangan tiga kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM.

b. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas

Ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya mutu manajemen pendidikan di Kota Sukabumi sebagai perwujudan dari kota pelayanan jasa berkualitas bidang pendidikan. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan manajemen pendidikan yang berstandar nasional agar tercapai efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, adil, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pendidikan;

2. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kompetensi pada jenjang pendidikan dasar sampai pada jenjang perguruan tinggi yang dilakukan melalui peningkatan kualitas peserta didik dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik serta tenaga kependidikan lainnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan formal dan non formal, tersedianya fasilitas pendidikan yang modern, lengkap, merata di wilayah Kota Sukabumi serta dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. Terpenuhinya kebutuhan akan jenjang pendidikan tinggi di Kota Sukabumi dengan membangun perguruan tinggi negeri yang berkembang secara sinergis dengan perguruan tinggi swasta sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik kota di bidang pendidikan yang bermuara pada peningkatan perekonomian kota secara keseluruhan;
5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan keagamaan berbasis kompetensi dan kearifan budaya lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; dan/atau
6. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan bidang pendidikan di Kota Sukabumi.

c. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas manajemen bidang kesehatan yang akuntabel, efisien, efektif, transparan, adil, dan tidak diskriminatif;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya gaya hidup sehat serta kualitas kesehatan masyarakat, yang pada akhir Tahun 2025 ditandai dengan meningkatnya indeks kesehatan yang berupa Angka Harapan Hidup (AHH), menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), meningkatnya status gizi masyarakat, serta rendahnya tingkat prevalensi penyakit degeneratif dan penyakit menular termasuk HIV/AIDS;
3. Meningkatnya ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang handal dan berdaya saing tinggi, konektifitas dengan iptek kedokteran termaju serta merata di seluruh Kota Sukabumi baik institusi pemerintah maupun swasta yang dapat menjadi salah satu daya tarik kota di bidang kesehatan yang bermuara pada peningkatan perekonomian kota secara keseluruhan;
4. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan serta perlindungan kesehatan (*universal health insurance coverage*) terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kesehatan reproduksi perempuan;
5. Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman serta ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan; dan/atau
6. Rendahnya tingkat penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (Napza), peredaran obat-obatan, kosmetika, alat kesehatan dan makanan.

d. Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Lapangan Usaha Lainnya yang Berdaya Saing Tinggi

Ditandai dengan indikator sebagai berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan yang didukung oleh sektor-sektor lapangan usaha yang berdaya saing tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta mengurangi jumlah penduduk

miskin;

2. Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang perannya semakin meningkat dengan kualitas pelayanan yang semakin bermutu dan berdaya saing tinggi, meningkatnya keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem yang produktif serta membaiknya fasilitas jasa keuangan dan pengelolaan keuangan sehingga diharapkan pada akhir tahun 2025 Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, penyerapan tenaga kerja, investasi serta nilai ekspor di Kota Sukabumi akan meningkat; dan/atau
3. Tercapainya proporsi yang seimbang dalam kredit investasi antara yang dikucurkan oleh sektor perbankan yang digunakan untuk menggerakkan aktivitas perekonomian sektor swasta baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri serta masyarakat, dengan alokasi pembiayaan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dan Amanah

1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di semua sektor sehingga pelaksanaan birokrasi pemerintahan dapat diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan etos kerja birokrasi serta budaya kerja yang memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih;
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah, bebas KKN, bertanggung jawab, mempunyai kompetensi tinggi untuk mendukung pembangunan daerah dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel; dan/atau
3. Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap demokrasi yang berlandaskan hukum dan berkeadilan sehingga terciptanya ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mewujudkan pemerintah yang berdasarkan hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah serta turut menjaga keamanan pembangunan, sehingga secara sistematis akan mengarah pada rendahnya tingkat kriminalitas, rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial.

f. Mewujudkan Kota Sukabumi yang Nyaman dan Indah

Ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata ruang yang seimbang dan memadai untuk pemenuhan kebutuhan aktivitas masyarakat dengan kawasan konservasi yang ada sehingga dapat menciptakan daerah tanpa kawasan dan pemukiman kumuh, serta tersedianya sarana dan prasarana/infrastruktur perkotaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan seimbang di seluruh wilayah perkotaan terutama keseimbangan antara wilayah utara dengan wilayah selatan Kota Sukabumi,
2. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, selaras, seimbang dan lestari sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap manusia dari resiko bencana untuk tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
3. Tersedianya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dan ruang publik yang cukup, nyaman, indah sebagai tempat masyarakat berinteraksi dan bersosialisasi yang diharapkan dapat menumbuhkan kerukunan dan keserasian dalam masyarakat.

IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA SUKABUMI TAHUN 2005 – 2025

IV.1.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya

Melalui pengembangan dan pembangunan SDM yang memiliki kualifikasi lmtaq dan lptek guna mencapai SDM yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beretika dan bermoral serta yang menguasai, dan memanfaatkan lptek secara handal dan berkelanjutan. Terbentuknya SDM yang profesional, kreatif, inovatif, inventif, dan bertanggung jawab sehingga dapat menjadi teladan bagi individu, keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain tanpa mengesampingkan budaya dan kepribadian nasional. SDM yang berkualitas didukung pula oleh :

1. Pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali serta lebih terbukanya kesempatan kepada masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kualitas dirinya;
2. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Peningkatan *human investment* melalui peningkatan pendidikan dimulai sejak usia dini sampai ke jenjang pendidikan perguruan tinggi agar terbentuk anak, remaja dan masyarakat Kota Sukabumi yang unggul dan berwawasan luas dengan penguasaan teknologi dan bahasa asing serta pemanfaatan dan pengembangan lptek di berbagai bidang menuju masyarakat yang berbudaya produktif;
4. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik lptek untuk meningkatkan sumber daya manusia dan keunggulan daerah;
5. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, lptek, dan politik.
6. Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat;
7. Pembangunan keagamaan diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercapai suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis;
8. Pembangunan SDM mengutamakan peran agama sebagai landasan moral dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk mewujudkan SDM yang berkarakter, beretika, dan berbudaya bangsa Indonesia;
9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta perlindungan anak melalui upaya-upaya penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan jaminan perlindungan anak baik bersifat preventif, kuratif, dan remediatif yang berbasis masyarakat;
10. Peningkatan keahlian dan perlindungan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat dan lanjut usia melalui penguatan lembaga jaminan sosial;

11. Pembangunan SDM aparatur dilakukan melalui upaya simultan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pencapaian *good governance* dan *clean government* yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur;
12. Peningkatan kualitas tenaga kerja lebih diarahkan kepada aspek profesionalisme dan kredibilitas sesuai dengan keahlian sehingga memiliki kemandirian, bertalenta tinggi, dan merupakan *brand image* kinerja tersendiri yang lebih produktif dalam berkarya yang menjadi keunggulan dari SDM Kota Sukabumi.

IV.1.2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas

Adalah melalui pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur dengan peningkatan manajemen pendidikan, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat di semua jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna, dan Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai Iptek, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta tuntutan kebutuhan pasar. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada :

1. Mewujudkan Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan berkualitas di Bidang Pendidikan, melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas Iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan melalui pengembangan manajemen pendidikan berbasis sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan dengan menerapkan otonomi perguruan tinggi yang memenuhi dan sudah terakreditasi sesuai standar nasional;
3. Keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing tinggi, menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, sehingga perlu dikembangkan sistem kebijakan pendidikan yang unggul yang didukung pula oleh penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat;
4. Pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dengan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional melalui pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat melayani keragaman peserta didik dari semua jenis dan jalur pendidikan dengan memperhatikan kearifan budaya lokal untuk kebutuhan pasar kerja;
5. Pendidikan menengah kejuruan berbasis agro industri, kepariwisataan, industri manufaktur, dan industri jasa;
6. Pembangunan pendidikan yang mampu untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi;
7. Penambahan titik pelayanan perpustakaan dan pemberdayaan perpustakaan;

8. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan didukung oleh atmosfer pendidikan yang kondusif baik yang disediakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat;
9. Penyediaan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan iptek untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Kota Sukabumi termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar;
10. Peningkatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pendidikan tinggi berskala regional, nasional dan internasional sesuai dengan perkembangan global;
11. Penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan yang didukung oleh penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu serta pemantapan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua dan sepanjang hayat dengan melalui penyempurnaan kurikulum berbasis keilmuan;
12. Pembangunan pemuda untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik.
13. Pembangunan olahraga untuk peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

IV.1.3. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Adalah terealisasi mutu SDM yang produktif, siap berkompetitif secara dinamis melalui peningkatan manajemen kesehatan, pengembangan informasi kesehatan dan pembiayaan kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat dimaksimalkan. Disamping itu pemerintah juga perlu mengeluarkan regulasi dalam bidang manajemen kesehatan, pelayanan kesehatan, pelibatan pihak swasta dan masyarakat dalam mencapai *universal health insurance coverage* dalam pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan basis peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta optimalisasi pelaksanaan reformasi kelembagaan/pengelolaan fasilitas kesehatan dengan SDM yang produktif mempunyai nilai tambah kompetitif dan daya saing tinggi menjadi kelembagaan entitas mandiri. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan pada :

1. Peningkatan mutu manajemen kesehatan untuk terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Kota Sehat;
2. Peningkatan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan perhatian khusus pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, sebagai upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit. Pendidikan masyarakat untuk menjalankan hidup sehat perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yang terkait dengan masalah kesehatan;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berkesinambungan dan berkualitas termasuk bagi penduduk miskin melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Iptek, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor.

4. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan titik berat pada pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan masyarakat miskin. Di samping itu juga dilaksanakan dengan usaha sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pengendalian penyakit menular, serta pengembangan peran institusi-institusi kesehatan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan untuk membentuk lingkungan dan perilaku sehat serta peningkatan peran dan fungsi kaum perempuan sebagai penggerak pembangunan di seluruh tingkat dan lapisan masyarakat;
5. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dengan menyediakan layanan kesehatan yang diarahkan pada pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan ketimpangan wilayah dan antar kelompok penduduk. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medis dan meningkatkan distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau;
6. Peningkatan pelayanan kesehatan tanpa sambungan (*seamles*) antar pelayanan dasar dan rujukan sebagai perwujudan dari konsep rumah sakit rujukan (*hospital without wall*);
7. Optimalisasi tujuan Pembangunan Kesehatan yaitu *equity, quality, efficiency, dan sustainability* melalui peningkatan peran dan fungsi puskesmas sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan dan perilaku sehat melalui penerapan paradigma sehat, mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) serta upaya fasilitasi keluarga guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam mengidentifikasi masalah kesehatan;
8. Peningkatan upaya promosi kesehatan yang merupakan salah satu prioritas penting yang harus ditempatkan secara integral dengan upaya simultan penanggulangannya dan pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik untuk mencegah timbul dan berkembangnya wabah penyakit, baik penyakit menular yang merupakan akibat lingkungan hidup maupun perilaku sosial yang menyimpang dengan pola hidup yang sehat;
9. Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) perlu disosialisasikan terutama kepada generasi muda melalui berbagai media maupun penyuluhan-penyuluhan. Dengan upaya yang sama, pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS juga perlu dilakukan;
10. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat-obatan, kosmetika, alat-alat kesehatan, dan makanan.

IV.1.4. Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Lapangan Usaha Lainnya yang Berdaya Saing Tinggi

Adalah melalui pengembangan fungsi kota sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa yang mampu memperkuat perekonomian Kota Sukabumi dari berbagai sektor lapangan usaha yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, serta membangun kemitraan bersama usaha kecil, menengah, dan besar dengan ditunjang oleh regulasi yang kondusif. Pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi, diarahkan pada :

1. Pembangunan secara simultan yang mengerahkan seluruh potensi dan sektor pembangunan ekonomi melalui penguatan pembangunan makro dan mikro ekonomi, disertai dengan pengembangan dan penataan pusat perdagangan dan jasa, sekaligus pengembangan daya cipta bagi pengembangan sektor lapangan usaha lainnya;
2. Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian dalam arti luas agar mampu memperkuat basis produksi untuk ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional dengan tetap mempertahankan lahan pertanian produktif secara selektif. Peningkatan ini diselenggarakan melalui revitalisasi dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha;
3. Optimalisasi peranan pemerintah yang efektif sebagai fasilitator dan regulator sekaligus sebagai salah satu katalisator pembangunan yang tidak hanya berjangka waktu pendek tetapi juga berperspektif jangka panjang, sehingga tercipta lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing tinggi;
4. Pengembangan ekonomi dilakukan dengan memperkuat perekonomian Kota Sukabumi yang berorientasi dan berdaya saing pada skala regional dan nasional, dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan skala lokal, regional dan nasional yang kokoh;
5. Pembangunan kelembagaan perekonomian yang sehat dengan membangun regulasi perizinan yang efektif dan efisien, serta menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha yang sehat serta adanya perlindungan konsumen;
6. Pengambilan kebijakan aspek pasar kerja untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja dengan lebih memperhatikan upah kerja yang memadai, keselamatan kerja, dan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja;
7. Perkuatan sistem distribusi dalam perdagangan yang lebih efisien dan efektif sehingga terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga terjangkau dan meningkatnya perdagangan antar daerah dan antar wilayah;
8. Pengembangan agroindustri dan agribisnis dengan tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian sebagai salah satu ruang terbuka kota;
9. Pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing, pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi, meningkatkan daya saing UMKM diberbagai tingkatan sehingga menjadi salah satu bagian yang terintegrasi dari seluruh kegiatan ekonomi dan memperkuat dasar perekonomian daerah;
10. Peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan, akses permodalan dan peningkatan produktivitas serta menjalin penguatan hubungan/ kemitraan bersama usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, sehingga UMKM dapat menjadi pelaku ekonomi kerakyatan yang berbasis iptek dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar yang kompetitif.
11. Mewujudkan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing baik pasar lokal, nasional dan internasional, lebih ditekankan pada pengembangan industri kecil dan menengah yang berbasis Iptek sehingga mampu tumbuh dan berkembang guna menciptakan lingkungan usaha

yang kuat, dan sehat serta menjalin penguatan hubungan/kemitraan bersama usaha kecil, menengah, dan besar;

12. Pemberdayaan Koperasi didorong untuk berkembang secara luas melalui peningkatan kapasitas usaha oleh pengelola dan anggotanya yang langsung melaksanakan kegiatan usaha di berbagai sektor,
13. Pengembangan kepariwisataan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan kerja melalui revitalisasi wisata yang ada, pengembangan potensi wisata religius dan penunjang wisata serta pengembangan akar dan alam budaya Jawa Barat yang mencerminkan jati diri masyarakat Kota Sukabumi;
14. Peningkatan investasi untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkualitas dalam rangka memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik melalui regulasi perizinan yang lebih transparan, akuntabel, dan fleksibel maupun promosi yang mempunyai akses luas yang berbasis teknologi informasi maupun *event-event* dan *expo* yang berskala nasional maupun internasional serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai;
15. Optimalisasi peran sektor keuangan dalam hal ini lembaga jasa keuangan bank dan non-bank dalam pendanaan pembangunan terutama untuk peningkatan akses pendanaan bagi usaha kecil menengah;
16. Mendorong peningkatan difusi IPTEK dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan non bisnis di daerah serta mendorong investasi dan langkah pengembangan/penguatan sistem IPTEK yang terarah di daerah.

IV.1.5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dan Amanah

Adalah melalui pemantapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clear government*); melalui demokrasi dan kebebasan politik yang bertanggung jawab agar terciptanya stabilitas politik, konsistensi dalam penengakan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Kota Sukabumi sesuai dengan hak asasi manusia yang tercantum dalam dasar konstitusi Republik Indonesia. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada :

1. Pembentukan birokrasi yang profesional dengan membangun aparatur pemerintah Kota Sukabumi yang memahami etika birokrasi dan budaya kerja, pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta penerapan komitmen percepatan pemberantasan KKN;
2. Peningkatan pelayanan pada masyarakat untuk menciptakan pembangunan berkeadilan dan pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya;
3. Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, fungsional, DPRD, dan pengawasan masyarakat;
4. Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui optimalisasi sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Pembiayaan pemerintah diutamakan untuk pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik dan ekonomi serta mendukung peningkatan daya saing ekonomi kota;

5. Pengelolaan pendapatan daerah yang menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan. Prinsip nilai tambah pendapatan daerah akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sebagai upaya mobilitas sumber daya lokal melalui peningkatan pendapatan daerah yang tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber daya;
6. Peningkatan aspek kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Sukabumi. Peningkatan sumber dana dilakukan dengan optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan aset daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi yang ada dengan tidak membebankan terhadap masyarakat;
7. Pemerintahan yang berdasarkan hukum melalui pembangunan hukum yang diarahkan pada pembinaan aparatur sehingga makin terwujudnya pemahaman hukum yang mantap oleh semua aparatur, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, penerapan dan penegakan hukum dan HAM, perlindungan hukum, kesadaran hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tertib, teratur dan lancar;
8. Pemantapan kelembagaan demokrasi agar lebih kokoh, melaksanakan reformasi struktur politik dan nilai-nilai persamaan, anti kekerasan dan nilai-nilai toleransi;
9. Pembangunan bidang komunikasi dan informasi yang mendukung penyelenggaraan demokratisasi yang harmonis, dengan peran aktif pers dan media informasi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mewujudkan kehidupan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat sehingga dapat mendukung partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun dalam menjaga keamanan pembangunan, dan mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban serta menghapuskan potensi konflik sosial;
11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan masyarakat yang dibangun melalui mekanisme jaring pengaman masyarakat yang berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
12. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

IV.1.6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang Nyaman dan Indah

Adalah melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kondisi sumber daya alam yang ada, peningkatan daya dukung lingkungan melalui pemanfaatan ruang terbuka, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial dan ekonomi. Hal ini untuk menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan memenuhi kaidah-kaidah estetika kota, sehingga terwujud kota yang didasarkan pada aspek peningkatan kualitas kehidupan yang memberikan kenyamanan dan keindahan bagi kehidupan masyarakat Kota Sukabumi. Pencapaian Kota Sukabumi yang nyaman dan indah diarahkan pada :

1. Optimalisasi penerapan Rencana Tata Ruang sebagai acuan kebijakan spasial pembangunan di setiap sektor, agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan, penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimalisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan kawasan konservasi dengan penerapan dan penegakan hukum secara tegas dan adil. Pembangunan dilaksanakan secara merata dan seimbang di wilayah kota terutama wilayah utara dengan wilayah selatan kota dan melaksanakan revitalisasi kawasan kota berupa penataan, peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya, dan penataan pelayanan fasilitas publik;
2. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya melalui penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, efisien dan mandiri sehingga mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan;
3. Pembangunan transportasi yang mampu menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, nyaman, aman dan selamat sebagai sumber pergerakan orang, barang dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi dengan sistem yang saling menguntungkan, menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; menyelaraskan semua peraturan daerah baik yang mencakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkenan, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya. Menghilangkan segala macam bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa, mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat; menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks *global services*, dan membangun fasilitas angkutan publik massal hemat energi dan ramah lingkungan untuk daerah perkotaan;
4. Konservasi dan menjaga serta melestarikan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
5. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada peningkatan kualitas pengelola aset, pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar dan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, kredibilitas, dan profesional, serta penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin;
6. Terwujudnya sistem pengelolaan persampahan yang tidak terputus mulai dari penghasil sampah, pemilahan sampah organik dan an-organik,

pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir sampah ke TPA. Pemilahan dilakukan oleh masyarakat sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah;

7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan memenuhi prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang, pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan, pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
8. Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Kebijakan pengelolaan SDA perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; pemerintahan kota yang kredibilitas dalam mengendalikan konflik, SDM yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan, serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua jenjang.
9. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kebijakan ini terutama ditujukan bagi generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas dan peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup, sehingga dengan demikian generasi muda dimaksud mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari;
10. Penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari luas kota dan ruang *public facilities* untuk mengimbangi lahan terbangun.

IV. 2. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud, maka pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang segera diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam 6 (Enam) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dari urgensi permasalahan, Atas dasar tersebut tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut :

IV.2.1 RPJMD Ke I (2005 - 2008)

Pada kurun waktu Tahun 2005–2008 secara kebijakan perencanaan masih berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kota Sukabumi Tahun 2003 – 2008. Arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi yang ditempuh yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan dan pencapaian Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah yang amanah;
2. Pemberdayaan ulama dan tokoh masyarakat dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan etika, budaya, dan aturan hukum yang berlaku;
3. Menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan investasi modal dengan dunia usaha/industri untuk menunjang perekonomian rakyat;
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk kemakmuran masyarakat dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber PAD. Penerapan prinsip, norma, asas, dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD menjadi dasar kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah;
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

IV.2.2 RPJMD Ke II (2008 – 2013)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD Ke I., arah pembangunan RPJMD ke-II ditetapkan sesuai dengan indikator-indikator dalam MDGs yang diharapkan tercapai pada tahun 2013. Secara umum arah pembangunan RPJMD ke-II adalah tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), kelembagaan dan organisasi perangkat daerah, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemanfaatan ruang yang serasi dan efisien, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta terbangun dan tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung perekonomian kota. RPJMD Ke II ditujukan untuk lebih memantapkan pada :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya

Pada tahap ini dititikberatkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas yang ditandai dengan semakin baiknya kehidupan masyarakat Kota Sukabumi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sejalan dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan dalam menjalankan kegiatan hidupnya. Dilihat dari indikator IPM adalah semakin membaiknya perencanaan, pengelolaan dan pengendalian SDM yang unggul, bersih, berwibawa, profesional dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan untuk angka laju pertumbuhan penduduknya diharapkan secara bertahap dapat ditekan dan dikendalikan.

2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas

Pada Tahap ini peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas dititikberatkan kepada peningkatan tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap, peningkatan status akreditasi sekolah, sekolah berstandar nasional, Sekolah Berstandar Internasional (SBI), peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, pembentukan perguruan tinggi negeri yang dapat diminati masyarakat di Kota Sukabumi dan sekitarnya (Bogor, Kab. Sukabumi, Cianjur, Banten), kesesuaian kualitas lulusan dengan kebutuhan pasar kerja serta kerjasama dengan pihak

swasta untuk pengembangan pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar pelayanan nasional.

3. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Tahap ini dititikberatkan pada pemerataan pelayanan kesehatan melalui pemberian akses/kemudahan yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Sukabumi dan sekitarnya dalam menggunakan pelayanan kesehatan yang didukung oleh manajemen kesehatan yang akuntabel, membaiknya kualitas pelayanan kesehatan, terpenuhinya rasio antara jumlah sarana kesehatan yang didukung oleh tenaga dokter dan paramedis yang profesional dengan jumlah penduduk dan meningkatnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat baik pada waktu sakit maupun untuk konsultasi mengenai kesehatannya.

4. Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Lapangan Usaha Lainnya Yang Berdaya Saing Tinggi

Tahap ini dititik beratkan pada :

- Peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan Koperasi dan UMKM secara kompetitif, pembangunan pertanian, peningkatan kawasan perdagangan di Kota Lama dan Pembentukan kawasan perdagangan di kawasan kota baru (Baros, Cibeureum dan Lembursitu) secara terpadu;
- Menciptakan iklim usaha yang kompetitif, kondusif dan nyaman bagi usaha serta meningkatkan pengembangan Iptek yang berkaitan dengan proses produksi;
- Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta, dan diarahkan pada tahapan konsolidasi dan *networking*;
- Pengembangan agribisnis yang memiliki kekhasan dan jaminan kualitas produk yang diterima oleh pasar;
- Peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, dan peningkatan kemitraan dengan pihak-pihak terkait;
- Pengembangan industri andalan masa depan sebagai penguat penggerak pertumbuhan ekonomi;
- Optimalisasi pasar lokal, nasional dan internasional dan penataan saluran distribusi barang.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dan Amanah

Tahap ini dititikberatkan kepada :

- Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi untuk mendukung optimalisasi pelayanan masyarakat;
- Penataan kelembagaan dan organisasi daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam mendukung upaya pencapaian Visi Kota Sukabumi dan kesejahteraan masyarakat;
- Pembangunan aspek keuangan daerah diarahkan pada efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan pada wajib pajak dan retribusi serta optimalisasi kinerja SKPD penghasil

pendapatan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang Nyaman dan Indah

Pada tahap ini dilakukan penataan ulang tata ruang kota dengan infrastruktur pendukungnya untuk mendukung kota agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peran yang diemban sebagai Kota Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan. Kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan sudah semakin berkurang yang ditunjukkan dengan meratanya pelayanan aktivitas perekonomian dan pemerintahan di seluruh wilayah Kota Sukabumi, hal ini ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana pemukiman dan infrastruktur pendukung lainnya yang merata diseluruh wilayah Kota Sukabumi.

IV.2.3 RPJMD Ke III (2013 – 2018)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD Ke II, pada RPJMD III, ditandai dengan daya saing perekonomian Kota Sukabumi yang semakin kuat, kompetitif dan terpadu, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan swasta, penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Pada sektor perdagangan dan jasa tahapan pembangunan ini diarahkan pada penciptaan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, pengembangan industri kecil yang tangguh, perluasan kawasan perdagangan di daerah cepat tumbuh, pemberdayaan produk dalam lokal serta pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri. RPJMD Ke III ditujukan untuk lebih memantapkan pada :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya

Pada tahap ini dititikberatkan pada upaya perwujudan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, ditandai dengan terus meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintah yang meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah-daerah berpenghasilan menengah. Di samping itu indikator lainnya adalah menguatnya kinerja kelembagaan pengelola SDM, dan tetap konsisten dalam upaya penegakan hukum serta pendayagunaan SDM yang berkesinambungan.

2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas

Pada tahap ini dititik beratkan pada :

- Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal;
- Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien; dan/atau
- Mensinergikan antara pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar pelayanan nasional.

3. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahap ini ditandai dengan terakreditasinya seluruh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dikelola secara profesional oleh tenaga

kesehatan yang sudah mengikuti sertifikasi profesi dan berdampak pada menurunnya penderita gizi buruk, gizi kurang serta meningkatnya aksesibilitas penduduk miskin ke pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan menggunakan jaminan/asuransi kesehatan masyarakat miskin dengan *contact rate* nya mencapai 1 kali setiap tahunnya.

4. Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Lapangan Usaha Lainnya yang Berdaya Saing Tinggi

Pada tahap ini dititikberatkan pada upaya untuk mewujudkan kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain :

- Peningkatan mutu dan pengembangan teknologi agribisnis mulai dari hulu sampai hilir dalam kerangka merespons tuntutan konsumen terhadap mutu, kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian produk;
- Menciptakan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi dan peningkatan kemampuan sumber daya industri kecil; dan/atau
- Perluasan kawasan perdagangan di daerah yang cepat tumbuh serta penataan distribusi barang.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dan Amanah

Pembangunan pemerintahan diarahkan pada pelembagaan aspek demokrasi yang menjunjung etika, penguatan produk hukum daerah (Perda) untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap ini dititikberatkan pada :

- Peningkatan operasionalitas dan profesionalitas aparatur yang didukung oleh standar prosedur operasional yang jelas dan tata laksana serta kompetensi yang memadai;
- Aspek keuangan daerah adalah dengan melanjutkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada lima tahun kedua serta diarahkan pada peningkatan daya guna kekayaan dan asset daerah, optimalisasi pengelolaan belanja daerah terutama di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Menjaga kesinambungan fiskal daerah dan intensifikasi peluang-peluang untuk mendapatkan sumber dana di luar APBD Kota Sukabumi; dan/atau
- Mengintensifkan kerjasama antar daerah, antara Kota Sukabumi dengan kota/kabupaten di dalam negeri maupun dengan kota-kota diluar negeri sebagai bentuk implementasi kerjasama Citynet (*government to government* dan *city to city cooperation*)

6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang Nyaman dan Indah

Upaya untuk mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah pada tahap ini ditandai dengan semakin efisien dan efektifnya pemanfaatan ruang yang didukung oleh pemenuhan infrastruktur kota yang semakin memadai, penggunaan ruang untuk aktivitas perekonomian dan pemerintahan secara bertahap telah berjalan di wilayah kota baru. Sejalan dengan itu pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

IV.2.4.RPJMD Ke IV (2018 – 2023)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD Ke III, ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif serta terpadunya antara sektor jasa dan pertanian. Lembaga dan pranata telah tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik. Kondisi ini didukung dengan kemampuan iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian lebih efisien dan produktivitas tinggi. RPJMD Ke IV ditujukan untuk lebih memantapkan pada sektor :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya

Dalam tahap ini upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, ditunjukkan dengan makin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.

2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas

Perwujudan pelayanan pendidikan yang berkualitas pada tahap ini ditandai dengan meningkatnya dan meratanya tingkat akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan semakin efektif dan efisiennya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

3. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan oleh masyarakat Kota Sukabumi dan sekitarnya melalui mekanisme asuransi kesehatan serta terdapat peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan pada upaya promotif dan preventif sebagai perwujudan dan implementasi dari paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan yang berimbang pada menurunnya penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan penyakit yang disebabkan oleh faktor perilaku yang tidak sehat serta di sisi lain status gizi masyarakat meningkat, tumbuh kembang balita optimal, kesejahteraan meningkat, terwujudnya kesetaraan gender, dan terkendalinya pertumbuhan penduduk alami.

4. Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Lapangan Usaha Lainnya yang Berdaya Saing Tinggi

Dalam tahap ini upaya untuk mewujudkan kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain ditandai oleh struktur perekonomian yang semakin maju dan kokoh. Pada tahap ini diharapkan UMKM sudah dapat menguasai jaringan bisnis yang luas, hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis. Untuk itu diperlukan :

- *Holding Company* dan integrasi vertikal tingkat lokal dan regional;
- Kolaborasi bisnis di tingkat Kota Sukabumi dan Jawa Barat;
- Relasi bisnis di pasar regional, nasional dan internasional;
- Pemantapan perdagangan diarahkan kepada peningkatan daya saing industri yang berorientasi ekspor; dan/atau
- Menciptakan kesempatan kerja dalam jumlah yang besar dan mengoptimalkan pendayagunaan potensi Kota Sukabumi serta perluasan jaringan perdagangan baik lokal, regional, nasional maupun internasional.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Profesional Dan Amanah

Pada tahap ini pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional diarahkan pada penguatan kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Titik berat arah dan kebijakan pembangunan adalah pada :

- Pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum daerah baik dari sisi substansi, pelaksanaan dan penegakannya;
- Pemantapan proses *Check and Balances* antar lembaga di Kota Sukabumi;
- Pemantapan profesionalisme aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh standar pelayanan yang teruji; dan/atau
- Pemantapan aspek keuangan daerah melalui upaya-upaya yang telah dilakukan pada RPJMD ke III dan peranan sektor swasta dan masyarakat diharapkan semakin signifikan dalam berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang Nyaman dan Indah

Upaya untuk mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah dalam tahap ini ditandai dengan semakin lengkapnya infrastruktur kota dan semakin meningkatnya daya dukung fisik lingkungan kota. Kebutuhan ruang terbuka hijau dan taman-taman kota semakin terpenuhi secara bertahap. Seiring dengan semakin tingginya aktifitas baik perekonomian maupun pemerintahan di wilayah kota baru, revitalisasi kota lama mulai ditata untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan asri.

IV.2.5 RPJMD Ke V (2023 – 2025)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD Ke IV, ditandai oleh berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan indonesia di luar negeri, sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada Tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Pada tahap ini merupakan tahap pemeliharaan dan pengembangan semua aspek pembangunan yang telah dirintis dan dilaksanakan pada RPJM-RPJM sebelumnya. RPJMD Ke V ditujukan untuk lebih memantapkan pada :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya

Dalam tahap ini upaya meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain dengan dititikberatkan pada upaya pencapaian sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat indonesia yang beragama, beriman, dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman beragama, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi Iptek.

2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas

Perwujudan pelayanan pendidikan yang berkualitas pada tahap ini dititikberatkan pada pelaksanaan manajemen pendidikan yang sudah maju

dengan ditandai dengan peningkatan kualitas pendidikan secara kompetitif dan terpadu.

3. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Dalam tahap ini upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat Kota Sukabumi dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai rujukan (Rumah Sakit) baik milik pemerintah daerah maupun swasta melalui mekanisme asuransi kesehatan. Penanganan keluhan dan masalah kesehatan masyarakat ditangani secara profesional dan terpadu dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta. Masyarakat Kota Sukabumi sudah menerapkan prinsip-prinsip Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupannya, tingkat kesejahteraan penduduk semakin meningkat dan tidak ditemukannya penderita gizi buruk pada balita dan penduduk lanjut usia serta rendahnya *prevalensi* penyakit menular dan penyakit degeneratif.

4. Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Lapangan Usaha Lainnya yang Berdaya Saing Tinggi

Dalam tahap ini dititikberatkan pada :

- Penguatan industri kecil dan menengah yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pemanfaatan bahan baku terbaharukan (*recycle product*);
- Penanganan industri ramah lingkungan dan penguatan jaringan (*networking*) antar industri; dan/atau
- Pada sektor perdagangan diarahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, pemberdayaan produk dalam Kota Sukabumi, dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dan Amanah

Pada tahapan ini pembangunan aspek pemerintahan telah mencapai tahap melembaga dan mantap, diarahkan pada konsolidasi demokrasi dengan seluruh *stakeholders* untuk menjalankannya dalam implementasi politik, pemeliharaan dan peningkatan kondisi keamanan yang telah dicapai, peningkatan kemampuan dan kapasitas aparatur, aspek keuangan daerah, dan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang Nyaman dan Indah

Dalam tahap ini upaya untuk mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah ditandai dengan dapat terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh, selain itu kualitas lingkungan yang semakin meningkat dan pemenuhan ruang terbuka hijau kota mencapai 30%. Kota baru tumbuh berkembang dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang semakin baik

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Kota Sukabumi merupakan pedoman bagi pemerintah Kota Sukabumi dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi ini merupakan bahan acuan dan dasar bagi Calon Walikota Sukabumi dan Calon Wakil Walikota Sukabumi terpilih dalam menyusun visi, misi dan prioritas program yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi untuk durasi 5 tahunan, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan visi Kota Sukabumi **"TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI SEBAGAI PUSAT PELAYANAN BERKUALITAS BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERDAGANGAN**

DI JAWA BARAT BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA "perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi terhadap komitmen yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun;
3. Keberpihakan kepada kepentingan seluruh masyarakat yang ada di Kota Sukabumi;
4. Peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah dan peningkatan terhadap dunia usaha.

Sukabumi,
WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR